

**FRAMING DALAM AKSI PENOLAKAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG (RUU) PILKADA 2024 PADA AKUN @NARASI.TV**

(Skripsi)

Oleh

DEA ISMAN OKTAVIANI

2116031038



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

**FRAMING DALAM AKSI PENOLAKAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG (RUU) PILKADA 2024 PADA AKUN @NARASI.TV**

Oleh

DEA ISMAN OKTAVIANI

Skripsi

**Selaku Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU KOMUNIKASI Pada**

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

FRAMING DALAM AKSI PENOLAKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PILKADA 2024 PADA AKUN @NARASI.TV

Oleh

DEA ISMAN OKTAVIANI

Pada tahun 2024, revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dilakukan oleh DPR mendapat penolakan luas dari berbagai elemen masyarakat sipil karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan dianggap memperkuat praktik politik dinasti. Isu ini kemudian menjadi sorotan berbagai media, salah satunya akun Instagram @narasi.tv yang secara aktif membingkai isu ini melalui media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk *framing* yang dilakukan oleh akun Instagram @narasi.tv dalam membingkai aksi penolakan revisi RUU Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dan studi pustaka, dengan jumlah postingan yang menjadi unit analisis sebanyak 12 unggahan dari akun @narasi.tv. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* model William A. Gamson dan Modigliani yang terdiri dari core frame, condensing symbols, perangkat *framing*, serta perangkat reasoning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun @narasi.tv membentuk lima isu utama dalam *framing* penolakan revisi RUU Pilkada, yaitu: ketimpangan legislasi dan akses kekuasaan, politik dinasti, krisis demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta partisipasi publik dan solidaritas sipil. Kelima isu tersebut dibangun melalui penggunaan metafora, catchphrases, visual image, exemplar, dan depiction, serta diperkuat oleh reasoning seperti roots, appeal to principle, dan consequences. *Framing* ini tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mendorong mobilisasi publik dan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga demokrasi.

Kata kunci: *framing*, media sosial, @narasi.tv, RUU Pilkada, gerakan sosial, demokrasi, politik dinasti

ABSTRACT

FRAMING IN THE PROTEST AGAINST THE 2024 REGIONAL ELECTION BILL (RUU PILKADA) ON THE @NARASI.TV INSTAGRAM ACCOUNT

By

DEA ISMAN OKTAVIANI

In 2024, the revision of the Pilkada Bill (RUU) by the DPR received widespread rejection from various elements of civil society, as it was considered to contradict the Constitutional Court's decision and to reinforce the practice of dynastic politics. This issue then became the focus of various media outlets, including the Instagram account @narasi.tv, which actively framed the issue through social media. This study aims to examine the form of framing carried out by the Instagram account @narasi.tv in relation to the public protest against the revision of the 2024 Pilkada Bill. A qualitative descriptive approach was used in this study. Data were collected through digital documentation and literature review, with 12 posts from the @narasi.tv account serving as the units of analysis. The data were analyzed using the framing analysis model developed by William A. Gamson and Andre Modigliani, which consists of core frames, condensing symbols, framing devices, and reasoning devices. The findings show that the @narasi.tv account constructed five main issue frames in its coverage of the rejection of the Pilkada Bill revision: inequality in legislation and access to power, dynastic politics, democratic crisis, abuse of power, and public participation and civil solidarity. These issues were framed using metaphors, catchphrases, visual images, exemplars, and depictions, and were further reinforced through reasoning devices such as roots, appeals to principle, and consequences. This framing not only delivered critical perspectives but also encouraged public mobilization and fostered collective awareness about the importance of protecting democratic values.

Keywords: framing, social media, @narasi.tv, Pilkada Bill, social movements, democracy, dynasty politics

Judul Skripsi : ***Framing* dalam Aksi Penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2024 Pada Akun @narasi.tv**

Nama Mahasiswa : **Dea Isman Oktaviani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116031038**

Program Studi : **Ilmu Komunikasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Nanang Trenggono, M.Si.

NIP 196212041989021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi


Agung Wibawa, S.Sos.I., M.Si.
NIP 198109262009121004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nanang Trenggono, M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Abdul Firman Ashaf, S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dea Isman oktaviani
NPM : 2116031038
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Alamat : Jalan Majapahit Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar
Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Lampung
No. Handphone : 085840424880

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Framing dalam Aksi Penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2024 Pada Akun @narasi.tv**” adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) atau pun dibuat oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian atau tugas akhir saya ada pihak-pihak yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tekanan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 19 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Dea Isman Oktaviani
2116031038

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dea Isman Oktaviani, lahir di Lampung Timur, 02 Oktober 2003. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Suratman dan Ibu Sri Purwaningsih. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar SDN 1 Bandar Agung pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan di SMP Paguyuban pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMAS Kosgoro pada tahun 2018. Kemudian, penulis melanjutkan studi sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2021.

Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi HMJ Ilmu Komunikasi sebagai anggota bidang Jurnalistik pada kepengurusan 2022-2023. Penulis pernah mengikuti kegiatan MBKM penelitian dosen pada tahun 2023 dan MBKM Magang di Direktorat Kursus dan Pelatihan (DITSUSLAT) pada tahun 2024. Selain itu, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

MOTTO

“No matter what happens in your life, keep going”

-Dea Isman Oktaviani

“Sometimes the path seems so absurd because it’s not time for you to understand”

-Dea Isman Oktaviani

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

-Q.S Al-Baqarah:286

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

**Alhamdulillahirobbil'alamin telah tercipta karya penulisan ini dan
kupersembahkan karya ini untuk orang yang sangat kukasihi dan kusayangi**

Ibunda Tercinta dan Kakak-ku Patricia

Yang telah memberikan kasih sayang dan semuanya kepada saya, yang menjadi
penyemangat, suka maupun duka, terimakasih berkat doa mamak dan bapak nama
ku terus menggema di langit-nya .

**Karya ini kupersembahkan juga sebagai apresiasi yang mendalam teruntuk
diriku sendiri**

Yang sudah berjuang sejauh ini, yang mau mengerti dengan keadaan, yang mau
mengambil semua kesempatan dan yang mau menikmati semua semua moment.

Bapak dan Ibu Guru para pendidiku

Ribuan ucapan terimakasih akan selalu ku ucapkan kepada seluruh guru SDN 1
Bandar Agung, SMP Paguyuban, SMA Kosgoro, seluruh dosen di Jurusan Ilmu
Komunikasi dan tak lupa seluruh guru non formal yang telah berjasa besar dalam
memberikan ilmu pengetahuan, nasehat dan bimbingan yang tak terhingga
nilainya.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “*Framing* dalam Aksi Penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2024 Pada Akun @narasi.Tv” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Tanpa adanya bantuan, dukungan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, Mama, Kakak, Kakek, dan Nenek yang telah mencurahkan seluruh perhatian, tenaga, dan biaya, sehingga penulis mampu menempuh pendidikan dan menyelesaikannya.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Agung Wibawa, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung.
5. Bapak Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung.

6. Bapak Dr. Nanang Trenggono, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta kesediaan, kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, saran, ataupun kritik serta ilmu dan pengetahuan baru kepada penulis.
7. Bapak Dr. Abdul Firman Ashaf, S.IP., M.Si., selaku dosen penguji skripsi atas kesediaannya memberi kritik, saran, dan tanggapan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
8. Seluruh dosen, staf, administrasi, dan karyawan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis selama kuliah sampai saat ini.
9. Sahabat yang penulis jumpai semasa kuliah, Dila dan Riska, yang telah menjadi sosok penuh arti dalam perjalanan ini. Terima kasih atas segala bantuan, kebersamaan, dan tawa yang kalian hadirkan, menemani penulis melewati setiap tantangan perkuliahan dengan hati yang ringan, perasaan senang, dan kebahagiaan yang tak ternilai.
10. Teman-teman yang senantiasa bersama penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, Arum Grestia, Dinda Viorin Tahlia, Salsa, dan Cindy Rafina. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan indah yang kalian bagikan. Kehadiran kalian telah menjadi penyemangat dan sumber kebahagiaan yang berarti bagi penulis.

11. Teman-teman Ilmu Komunikasi Angkatan 2021, terima kasih atas bantuan, semangat, serta kebersamaanya selama menjadi mahasiswa.
12. Seluruh pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian ini, maupun dalam penulis menyelesaikan studi. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya. Semoga semua perbuatan baik mendapatkan balasan yang jauh lebih baik pula. Aamiin.

Dengan ini semoga Allah SWT memberikan Rahmat Karunia-Nya kepada kita Semua. Sebagai penutup penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu bagi semua orang. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa baik nya.

Bandar Lampung, 19 Juni 2025

Penulis,

Dea Isman Oktaviani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Kerangka Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Gambaran Umum	14
2.1.1 Narasi TV	14
2.2.1 Akun Instagram Narasi Tv	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Analisis <i>Framing</i>	17
2.3.1 <i>Condensing Symbols</i>	19
2.3.2 <i>Framing Device</i>	20
2.4 Gerakan Sosial	22
2.4.1 Jenis-jenis Gerakan Sosial.....	24
2.4.2 Tahap-tahap dalam Gerakan Sosial.....	27
2.5 Gerakan Sosial Baru.....	28

2.6 Teori Mobilisasi Sumberdaya (<i>Resource Mobilization Theory</i>).....	36
2.7 <i>New Media</i>	44
2.7.1 Ciri-ciri <i>New Media</i>	46
2.7.1 Karakteristik <i>New Media</i>	46
2.8 Media Sosial.....	45
2.8.1 Fungsi Media Sosial	48
2.8.2 Bentuk-bentuk Media Sosial	48
III. METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Tipe Penelitian	49
3.3 Fokus Penelitian	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Teknik Analisis Data.....	52
3.6 Keabsahan Data.....	52
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 <i>Condensing Symbols</i>	54
4.1.1.1 <i>Framing Device</i>	55
4.1.1.2 <i>Reasoning Devices</i>	75
4.2 Pembahasan.....	87
4.2.1 Produksi Pesan, Makna Pesan, dan Simbol Dalam Akun @narasi.tv Terkait Aksi Penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2024.....	87
4.2.2 <i>Framing</i> Aksi Penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada 2024 dalam Akun @narasi.tv.....	91

V. KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran.....	118
 DAFTAR PUSTAKA.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	16
2. Perangkat <i>Framing</i> Model Gamson dan Modigliani	20
3. Tipe Gerakan Sosial	25
4. Model Analisis <i>Framing</i> William A. Gamson dan Modigliani	52
5. Elemen <i>Metaphors</i>	56
6. Elemen <i>Catchphrases</i>	59
7. Elemen <i>Exemplar</i>	63
8. Elemen <i>Depictions</i>	69
9. Elemen <i>Visual Image</i>	71
10. Elemen <i>Roots</i>	75
11. Elemen <i>Appeal to Principle</i>	81
12. Elemen <i>Consequences</i>	84
13. <i>Issue Frame</i> : Ketimpangan Legislasi dan Akses Kekuasaan	91
14. <i>Issue Frame</i> : Politik Dinasti	92
15. <i>Issue Frame</i> : Krisis Demokrasi	93
16. <i>Issue Frame</i> : Penyalahgunaan Kekuasaan dan Manipulasi Hukum	94
17. <i>Issue Frame</i> : Partisipasi Publik dan Solidaritas Masyarakat Sipil	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Unggahan Seruan Peringat Darurat Pada Akun Instagram @narasi.tv.....	2
2. Aksi Demo Kawal Putusan MK.....	7
3. Unggahan Akun Instagram Narasi Tv	9
4. Kerangka Konsep Penelitian	13
5. Unggahan video peringatan darurat	87
6. Unggahan Video Pernyataan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. dan Ketua Umum PDIP	88
7. Unggahan Video Pernyataan Guru Besar UI dan UGM	89
8. Unggahan Pengunjuk Rasa dalam akun Instagram @narasi.tv	90
9. Unggahan Seruan Turun ke Jalan dan Seruan melalui Media Sosial.....	102

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, penggunaan Instagram sebagai media penyampaian pesan politik dan sosial semakin meningkat, khususnya dalam konteks gerakan sosial. Salah satu contoh yang menyoroti peran media sosial dalam memperluas mobilisasi dukungan terhadap isu gerakan sosial dapat dilihat pada gerakan penolakan atas revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, yang dilaporkan secara luas oleh akun-akun pemberitaan di Instagram. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR serta dinilai bertentangan dengan putusan MK.

Salah satu aksi protes yang mendapat perhatian luas adalah Aksi Peringatan Darurat dengan tagar Kawal Putusan MK, yang dipelopori oleh akun Instagram @narasi.tv. Aksi Peringatan darurat ini merupakan bentuk ajakan bagi masyarakat untuk terus mengawal putusan MK dan jalannya Pilkada 2024. Kata kunci peringatan darurat juga sempat menjadi trending topik di Twitter pada Rabu (21/8). Kata kunci lainnya yang kerap digunakan seiring dengan gambar ini adalah #KawalPutusanMK. Per Kamis (22/8) pukul 08.06. Tagar ini menjadi trending topik Indonesia nomor satu dengan jumlah unggahan 1,58 juta.



Gambar 1. Unggahan seruan Peringatan Darurat pada akun Instagram
@narasi.tv

Sumber : [Instagram.com/narasi.tv](https://www.instagram.com/narasi.tv)

Poster aksi Peringatan Darurat dengan lambang burung garuda berwarna biru ini mulai ramai dibagikan usai Baleg DPR mengesahkan RUU Pilkada. Beberapa akun besar turut mengunggahnya, seperti media Narasi TV, Najwa Shihab, Joko Anwar, Mira Lesmana, hingga pelawak Raditya Dika. Gambar ini digunakan sebagai bentuk perlawanan publik yang tidak sepakat dengan hasil rapat Baleg pada Rabu (21/8).

Gambar burung garuda warna biru pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @najwashihab, @matanajwa, dan @narasitv di Instagram. Poster Peringatan Darurat tersebut merupakan penggalan dari video lama yang diunggah oleh akun Youtube EAS Indonesia Concept pada 22 Oktober lalu. EAS Indonesia Concept adalah akun Youtube yang membuat video dengan konsep The Emergency Alert System (EAS) versi Indonesia. EAS adalah sistem peringatan darurat nasional Amerika yang didesain untuk menyebarkan pesan darurat di tengah siaran televisi dan radio. Dalam video di akun EAS Indonesia Concept, menampilkan gambar garuda yang disertai alarm morse dan musik dengan kesan menyeramkan. Konsep video singkat tersebut tampak seperti tayangan siaran TV nasional yaitu TVRI yang menggambarkan gaya video lawas pada tahun 1991. Isi video tersebut merupakan karya fiktif yang menceritakan tentang peringatan darurat untuk warga sipil Indonesia mengenai adanya aktivitas anomali yang dideteksi dipemerintahan.

Berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa turut melakukan aksi protes, baik melalui media sosial dengan membagikan video Peringatan Darurat di Instagram Story, maupun dengan turun langsung pada gerakan “demonstrasi menolak pengesahan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI”. Aksi ini merupakan ajakan untuk mengawal bersama isu Pilkada 2024 terkait polemik putusan MK dan revisi UU Pilkada, isu korupsi dan penegakan hukum, kebebasan berekspresi dan Demokrasi di Indonesia.

Aksi Peringatan Darurat ini muncul akibat kekecewaan masyarakat terhadap putusan MK yang dianggap dihambat oleh DPR. Badan Legislasi DPR dan Panitia Kerja memilih menggunakan putusan MA daripada MK terkait batas usia calon untuk maju di Pilkada 2024.

Pada Rabu, 21 Agustus 2024 DPR telah mengesahkan revisi UU Pilkada yang tidak sejalan dengan putusan MK terkait persyaratan pencalonan dalam Pilkada 2024. MK, pada Putusan No. 60/PUU-XXII/2024, menetapkan perubahan pada ambang batas pencalonan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota. Putusan MK mengatur bahwa partai atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan kepala daerah meskipun tanpa kursi di DPRD, dan menetapkan ambang batas pencalonan berdasarkan jumlah penduduk. Namun, DPR dengan tegas mempertahankan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk partai dengan kursi di DPRD, dan memberlakukan syarat sesuai putusan MK untuk partai tanpa kursi di DPRD.

Di samping itu, putusan kedua MK dalam Putusan No. 70/PUU-XXII/2024 mengatur batas umur minimal bagi calon kepala daerah. MK menetapkan “usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur serta wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati/walikota serta wakilnya”. Batas usia tersebut harus dipenuhi ketika penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan ketika pelantikan. Akan tetapi, Baleg DPR menetapkan bahwasanya batas usia minimal untuk calon gubernur ialah 30 tahun serta 25 tahun untuk calon bupati/walikota, dihitung sejak tanggal pelantikan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Proses revisi UU Pilkada yang digelar secara kilat ini memicu kemarahan publik karena digelar sangat singkat pada Rabu (21/8/2024), hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang bakal mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah dan menghambat praktik politik dinasti. Pasalnya putusan MK mengenai syarat usia dan ambang batas pencalonan kepala daerah berdampak terhadap Pilkada 2024. Dengan putusan tersebut, peluang Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024 terbuka kembali. PDI-P juga bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sementara itu Kaesang yang sudah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, seperti Gerindra, PKS dan Nasdem untuk maju di Pilkada Jawa Tengah 2024. Dengan putusan MK tersebut, putra bungsu Joko Widodo ini berpeluang gagal maju di Pilkada 2024 karena usianya belum mencapai 30 tahun saat penetapan paslon.

Langkah DPR merevisi UU Pilkada secara kilat ini memicu tuduhan publik bahwa hal tersebut dilakukan demi memuluskan jalan Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada 2024. Revisi yang memungkinkan perhitungan usia minimal calon berdasarkan tanggal pelantikan, bukan penetapan pasangan calon, memberikan keuntungan bagi Kaesang. Usianya yang baru mencapai 29 tahun saat penetapan pasangan calon memungkinkan ia tetap memenuhi syarat karena akan genap 30 tahun pada saat pelantikan. Hal ini dinilai sebagai langkah yang terindikasi mengakomodasi kepentingan politik tertentu, termasuk melanggengkan praktik politik dinasti.

Konteks ini semakin kompleks karena bersinggungan dengan isu politik dinasti Presiden Joko Widodo. Selain Kaesang, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencuat sebagai kandidat calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Hal ini memunculkan kritik bahwa keluarga Presiden Jokowi tengah memperkuat posisi politik mereka di berbagai level pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Di sisi lain, terdapat isu yang mengaitkan keberadaan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus paman dari Kaesang dan Gibran, yang menimbulkan spekulasi bahwa putusan-putusan MK berkaitan erat dengan

kepentingan keluarga Presiden Jokowi. Publik mempertanyakan independensi lembaga-lembaga negara dalam proses ini, mengingat beberapa keputusan yang diambil justru cenderung menguntungkan anggota keluarga Presiden.

Langkah revisi ini juga bertentangan dengan salah satu putusan MK yang dinilai bertujuan untuk menghambat praktik politik dinasti dengan menetapkan ambang batas pencalonan berdasarkan jumlah penduduk. Namun, DPR memilih mempertahankan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk partai dengan kursi di DPRD, yang dapat menguntungkan partai-partai besar yang sudah memiliki kekuasaan, termasuk partai pendukung Kaesang. Hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa proses revisi UU Pilkada ini sarat dengan kepentingan politik tertentu.

Tidak sedikit pihak, khususnya mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil, menggelar aksi protes sebagai bentuk penolakan terhadap revisi tersebut yang dianggap berpotensi mengubah peta kekuatan politik menjelang Pilkada 2024 karena dinilai memuluskan jalan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada 2024.

Dikutip dari laman resmi BBC News Indonesia, [bbc.com](https://www.bbc.com) Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiarti mengatakan putusan MA itu membuka pintu bagi Kaesang yang baru akan berumur 30 tahun pada Desember mendatang untuk mencalonkan diri dalam pilkada tingkat provinsi. “Selain karena umur, alasan kecurigaan lain adalah kenapa harus direvisi saat ini? Saat proses (pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan) tengah berlangsung dan kenapa perubahannya lewat jalur-jalur potong kompas?” kata Aisah saat dihubungi BBC News Indonesia, Jumat (31/05).

Dikutip dari [Katadata.co.id](https://katadata.co.id) dalam rapat yang dilakukan pada Rabu (21/8/2024), Baleg sepakat UU Pilkada mengacu pada putusan Nomor 23/P/HUM/2024 yang diputuskan MA pada tanggal 29 Mei 2024. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti sulit memahami langkah DPR melakukan Revisi Undang-Undang Pilkada usai putusan MK. Mu'ti menilai bahwa DPR seharusnya tidak berseberangan dengan putusan MK.

Ahli hukum tata negara UGM, Oce Madril mengungkapkan bahwa putusan MK bersifat final dan tidak bisa dibatalkan DPR. Keputusan MK memiliki kekuatan eksekutorial, begitu dibacakan oleh hakim konstitusi maka maknanya tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan untuk mengubah putusan MK, termasuk DPR. Putusan MK bersifat mengikat bagi semua pihak dan tanpa terkecuali. Bagi pihak yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi maka tindakannya bisa dianggap melawan hukum. Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Baleg DPR telah melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan secara tidak langsung menguatkan dugaan terkait politik kepentingan dimana keputusan merevisi RUU Pilkada dibuat demi kepentingan pihak tertentu.

Aksi Demo Kawal Putusan MK ini berlangsung pada 22 Agustus 2024 yang kemudian menjadi tren di berbagai platform media sosial. Tidak hanya masyarakat dan mahasiswa yang turut melakukan protes, baik melalui media sosial maupun turun langsung dalam aksi demo, sejumlah musisi dan selebriti Indonesia juga ikut ambil bagian. Beberapa musisi yang berpartisipasi dengan mengampanyekan Peringatan Darurat saat tampil di panggung antara lain Kunto Aji, Feel Koplo, Juicy Luicy bersama Andrian Khalif, Baale, Reality Club, Hindia, dan Danilla. Selain itu, selebriti Indonesia seperti Reza Rahadian, Arie Kriting, Abdel Achrian, Bintang Emon, Arif Brata, Abdel Achrian, Yudha Keling, serta Rigen Raklena juga terlibat dalam aksi protes di Jakarta. Aksi ini perbincangan hangat di media sosial, tidak saja di Instagram namun juga di Twitter dan Facebook.



Gambar 2. Aksi demo Kawal Putusan MK

Sumber : Kompas.com

Di sisi lain, kelompok aktivis 1998 bersama sejumlah guru besar dan akademisi turut ambil bagian dalam aksi di depan Gedung MK, Jakarta Pusat. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, mereka membawa poster bertuliskan "Indonesia Darurat Demokrasi, Matinya Demokrasi Indonesia", "Lawan Komplotan Pembegalan Konstitusi", dan "Tolak Pilkada Akal-Akalan Penguasa: Kawal Putusan MK".

Demonstrasi menolak revisi RUU Pilkada tidak saja dilakukan di Jakarta, namun juga meluas ke wilayah lain di Indonesia, seperti gerakan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, aksi Koalisi Indonesia Melawan (KIM) di Solo, serta aksi mahasiswa di Bandung dan Semarang. Aksi yang berlangsung pada 22 Agustus 2024 ini mendapat sorotan luas dari media online dan media sosial. Akun Instagram @narasi.tv, sebagai inisiator utama gerakan ini, berhasil memobilisasi ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti banyak aksi protes terhadap RUU kontroversial di Indonesia, aksi ini juga berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan, sebagaimana dilaporkan secara langsung oleh @narasi.tv melalui Instagram Live.

Para pakar komunikasi menyatakan bahwa keberhasilan gerakan sosial sangat bergantung pada bagaimana isu-isu tersebut dikemas, atau yang dikenal sebagai *framing*. Setiap gerakan sosial melakukan *framing*, yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. *Framing* menentukan apakah individu merasa terlibat dengan isu yang diperjuangkan dan siap untuk bertindak bersama. Snow, Rochford, Worden, dan Benford (1986) menekankan bahwa keberhasilan aksi

sosial bergantung pada seberapa jauh mereka dapat menguasai makna dari isu-isu tersebut. Ini terkait dengan bagaimana aktor-aktor perubahan berupaya mempengaruhi pemahaman publik dalam kebijakan. *Framing* ini sangat bergantung pada bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dapat menyediakan ruang publik yang bebas dari intervensi negara.

Dalam kasus gerakan sosial menolak revisi RUU Pilkada ini berhasil mewujudkan tuntutan dimana pada Kamis, 22 Agustus 2024 DPR RI memutuskan untuk tidak mengesahkan revisi Undang-undang Pilkada sesuai dengan gugatan Partai Buruh dan berbagai kelompok sipil yang melakukan aksi demo besar-besaran di berbagai tempat, termasuk di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. DPR lantas menyatakan putusan MK bakal berlaku dan menjadi rujukan dalam pencalonan pilkada karena revisi UU Pilkada mustahil digelar sebelum pendaftaran calon kepala daerah. Dibatakannya pengesahan RUU Pilkada ini menjadi akhir dari aksi demonstrasi menolak Revisi RUU Pilkada di seluruh Indonesia dan menjadi angin segar bagi masyarakat serta jalannya Pilkada 2024.

Pemberitaan mengenai gerakan sosial yang marak di media sosial, khususnya di Instagram, berperan penting dalam membentuk narasi publik. Akun-akun pemberitaan, termasuk @narasi.tv, turut melakukan pembingkai informasi atau *framing*, yang mempengaruhi cara publik memahami isu revisi RUU Pilkada ini hingga muncul gerakan sosial. *Framing* ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada sudut pandang dan kepentingan media yang memberitakan. *Framing* menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi persepsi khalayak melalui pilihan kata, gambar, dan konteks. Hal ini dapat kita lihat melalui salah satu unggahan akun Instagram @narasi.tv mengenai isu revisi RUU Pilkada dan respons masyarakat terhadap unggahan tersebut. Salah satu unggahan yang peneliti ambil merupakan unggahan kedua setelah unggahan Peringatan Darurat yang diupload oleh Narasi.



Gambar 3. Unggahan Akun Instagram Narasi Tv

Sumber : [Instagram.com/narasi.tv](https://www.instagram.com/narasi.tv)

Pada unggahan kedua ini media Narasi melakukan pembingkaiian terhadap DPR RI. Elemen yang dianalisis berupa tulisan, yaitu : “Bisa Maju Pilkada”, “Baleg Abaikan MK”, dan “Syarat Usia Calon” serta tagar #KawalPutusanMK dan #TolakPilkadaAkal2an. Sarkasme terhadap putusan DPR ini tak luput menjadi salah satu hal yang Narasi jadikan sebagai bahan untuk memprotes putusan Baleg DPR terkait revisi RUU Pilkada yang dilakukan pada 21 Agustus 2024 lalu. Tujuan dari sarkasme tersebut adalah sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap institusi DPR RI yang dianggap mengabaikan putusan MK terkait Pilkada 2024.

Pemakaian kata “Baleg Abaikan MK” “Syarat Usia Calon” serta “Bisa Maju Pilkada” diniatkan oleh Narasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi yang tengah terjadi dalam konstitusi Indonesia saat itu dimana Baleg DPR RI menganulir Putusan MK terkait syarat usia calon dalam Pilkada yang dianggap demi memuluskan jalannya Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dalam Pilkada 2024.

Tagar #TolakPilkadaAkal2an diniatkan oleh Narasi untuk membangkitkan prasangka terhadap wacana pengesahan revisi RUU Pilkada oleh DPR, sehingga DPR ditempatkan pada posisi sebagai pihak yang mesti dievaluasi atau ditinjau kembali segala bentuk keputusannya terkait revisi RUU Pilkada.

Sementara itu tagar #KawalPutusanMK diniatkan oleh Narasi untuk membangkitkan niatan audiens untuk terus mengawasi dan mengawal putusan

MK serta ajakan untuk menolak pengesahan revisi RUU Pilkada yang akan dilakukan oleh DPR RI.

Masyarakat memberikan berbagai respons terhadap unggahan tersebut. Namun sebagian besar masyarakat memberikan respon “setuju” terhadap unggahan Narasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa komentar dengan jumlah like terbanyak dalam unggahan tersebut yakni “Darurat Tata Negara”, “RIP”, “3 kata lucu: pemilu jujur bersih”, “Dinasti politik Jokowi”, “Semua berawal dari tiga kata lucu ‘gagal tiga periode’”.

Instagram ialah sebuah platform aplikasi untuk beragam foto serta video yang memberi peluang bagi pemakainya untuk mengambil gambar, merekam video, menambahkan filter digital, serta membagikannya ke sejumlah platform, termasuk Instagram sendiri. Aplikasi ini menjadi media untuk mengekspresikan diri secara visual, di mana pengguna bisa dengan mudah membagikan foto dan video berdurasi hingga 60 detik.

Fungsi terutama Instagram yakni untuk menjadi wadah mengupload serta membagikan foto yang diambil dari kamera atau album ponsel. Dengan popularitas yang terus meningkat, banyak aplikasi pendukung yang membantu pengguna berkreasi. Seiring perkembangan fitur, Instagram menjadi platform bagi pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka tidak hanya dalam bentuk foto, tetapi juga beragam konten visual lainnya.

Selain sebagai media untuk aktualisasi serta ekspresi diri, media sosial pun dapat memudahkan pelaksanaan aksi sosial. Tidak lagi diperlukan kumpulan puluhan atau ratusan ribu orang di lapangan untuk menggerakkan aksi sosial. Mobilisasi kini bisa dilakukan secara daring, dan seseorang dapat menunjukkan dukungannya terhadap suatu isu hanya dengan berbagi atau mengklik tanda dukungan.

Media sosial sudah jadi satu di antara alat komunikasi yang sangat efektif untuk membentuk opini publik serta menyebarkan informasi, terutama di tengah meningkatnya penggunaan platform digital dalam masyarakat. Gerakan sosial seperti Arab Spring (2010-2011), Gerakan Black Lives Matter (2013-sekarang), Hong Kong Protests (2019-2020), #MeToo Movement (2017), Protes di Chile (2019), Greta Thunberg dan Gerakan Iklim (Fridays for Future), Gerakan End

SARS (2020), serta Gerakan Farmers' Protest di India (2020-2021) memperlihatkan bahwasanya media sosial punya peranan besar untuk mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan kesadaran dan memungkinkan pengorganisasian aksi yang efektif tanpa batasan geografis.

Instagram menjadi salah satu platform yang sangat populer dan berpengaruh dalam menyebarkan informasi, yang mempunyai lebih dari satu miliar pemakai yang aktif di penjuru dunia. Instagram, dengan fitur visual dan naratifnya, memungkinkan penyampaian pesan yang singkat namun kuat, menjadikannya platform ideal bagi berbagai kelompok, termasuk gerakan sosial, untuk menyebarkan agenda dan pandangan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *framing* dalam aksi penolakan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada 2024 dalam akun @narasi.tv, dengan mempergunakan metode analisis *framing* William A. Gamson & Andre Modigliani. Temuan ini besar harapannya mampu berkontribusi untuk studi komunikasi politik dan sosial, terutama terkait peran media sosial dalam memengaruhi dinamika gerakan sosial di zaman digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana produksi pesan, makna pesan, dan simbol dalam akun @narasi.tv tentang aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2024?
2. Bagaimana *framing* aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2024 dalam akun @narasi.tv?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada penentuan latar belakang serta rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan yang meliputi:

1. Mengetahui produksi pesan, makna pesan, dan simbol dalam akun @narasi.tv terkait aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2024.

2. Mengetahui bentuk *framing* dalam aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada 2024 dalam akun @narasi.tv

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai nilai aksiologis (manfaat) yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini besar harapannya mampu menghadirkan kontribusi ilmu pada pengembangan Ilmu Komunikasi terutama bidang studi Analisis *Framing*.
 - b) Penelitian ini memiliki manfaat guna memperkaya pengetahuan dalam *memframing* sebuah gerakan sosial dengan memaksimalkan penggunaan media sosial untuk memobilisasi massa.
2. Manfaat Praktis
 - a) Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti terkait *memframing* gerakan baik secara aksi langsung maupun membuat gerakan yang mampu populis di setiap elemen masyarakat.
 - b) Sebagai syarat dalam menuntaskan jenjang studi strata satu di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

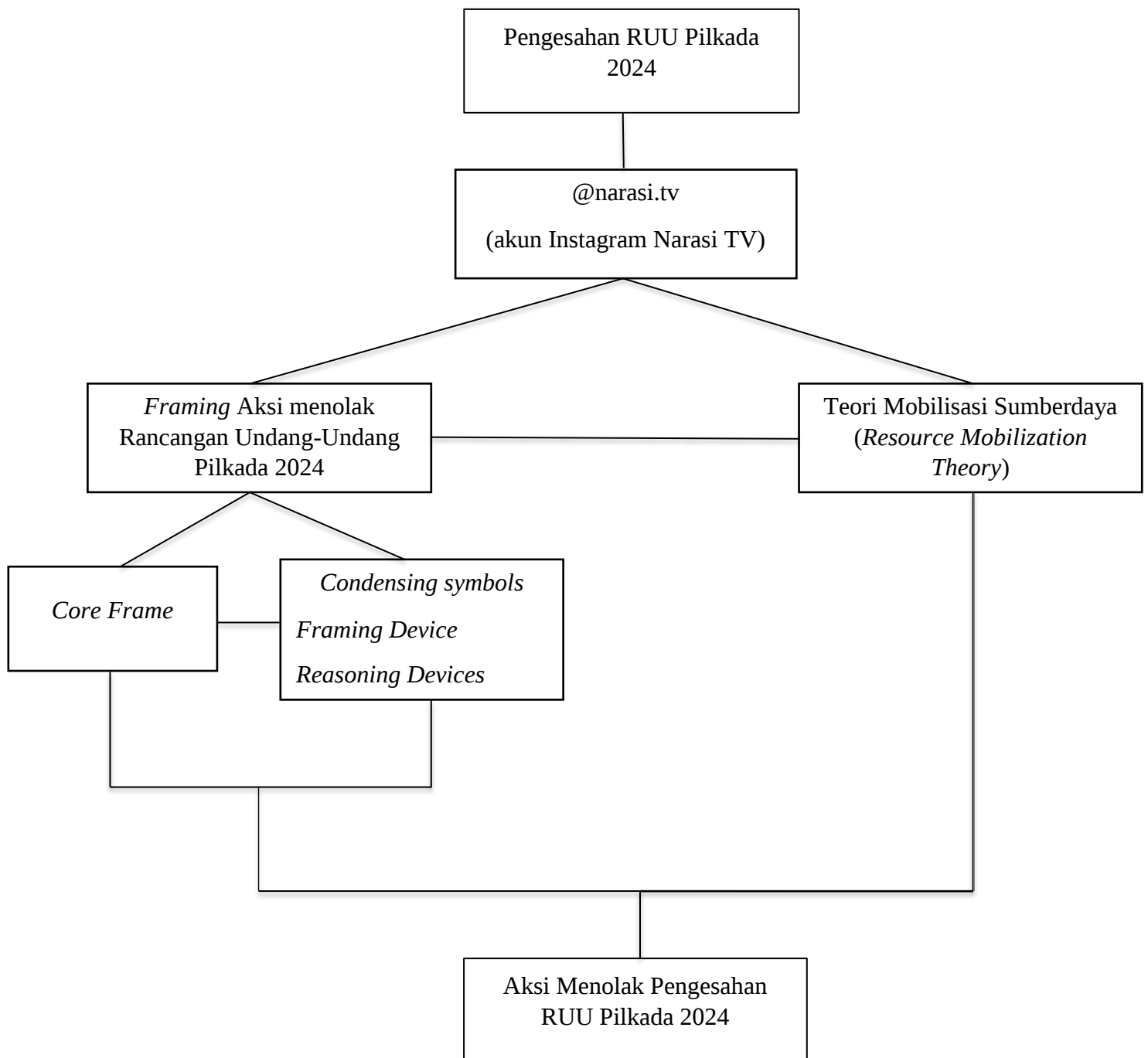
1.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan dasar konseptual dalam penelitian yang disusun dari hasil sintesis fakta empiris, observasi, dan kajian pustaka. Kerangka ini memuat teori, prinsip, serta konsep-konsep yang relevan sebagai acuan utama dalam menjelaskan variabel-variabel penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat, serta menjadi landasan dalam merumuskan jawaban atas masalah penelitian.

Menurut Widayat dan Amirullah (2002), kerangka berpikir atau kerangka konseptual adalah model yang menunjukkan keterkaitan antara teori dengan faktor-faktor penting yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini juga berperan sebagai penjelasan awal terhadap fenomena yang diteliti, dan dibangun berdasarkan teori yang sudah ada serta pengalaman empiris sebelumnya untuk membantu penyusunan hipotesis.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana framing dilakukan oleh akun Instagram @narasi.tv terhadap isu penolakan RUU Pilkada 2024. Sebagai media sosial yang aktif menyuarakan isu sosial dan politik, @narasi.tv berperan dalam membentuk opini publik melalui konten visual dan narasi caption. Postingan terkait RUU Pilkada 2024 tentu memuat proses pembingkaihan informasi.

Analisis dilakukan menggunakan model framing Gamson dan Modigliani yang menekankan elemen-elemen seperti *metafora*, *catchphrases*, *depictions*, *moral principles*, *simbol*, dan *exemplars*. Model ini membantu mengungkap bagaimana makna dibentuk dan pesan disampaikan melalui konten media sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan strategi framing yang digunakan oleh @narasi.tv serta konstruksi makna yang muncul dalam penyampaian isu penolakan RUU Pilkada 2024 di Instagram.



Gambar 4. Kerangka Penelitian
(Diolah oleh Peneliti)

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Narasi TV

PT Narasi Media Percaya atau Narasi TV, atau yang lebih dikenal sebagai Narasi, adalah media kolektif yang didirikan oleh jurnalis ternama Najwa Shihab (dikenal sebagai Mbak Nana) pada tahun 2018. Media ini didirikan tidak hanya oleh Najwa Shihab, tetapi juga bersama dua rekannya, Catharina Davy dan Dahlia Citra. Perkembangan Narasi TV yang pesat dan aksesnya pada informasi-informasi eksklusif tidak lepas dari peran Najwa Shihab, yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia jurnalistik sejak tahun 2000. Narasi TV termasuk dalam kategori media kolektif karena memiliki beberapa karakteristik yang serupa, seperti fokus pada konten lokal, cakupan media yang masih terbatas, serta struktur yang lebih sederhana.

Saat ini, Narasi tidak hanya memiliki kanal Youtube, namun Narasi juga mempunyai akun media sosial lainnya seperti website, Instagram, X, dan Facebook. Dari banyaknya media sosial yang digunakan juga memperluas jangkauan penonton sehingga media ini banyak diketahui oleh masyarakat luas.

2.1.2 Akun Instagram @narasi.tv

Akun Instagram @narasi.tv merupakan salah satu akun media sosial yang dimiliki oleh Narasi TV. Hingga saat ini akun Instagram @narasi.tv memiliki sebanyak 1,4 juta *followers* dengan jumlah unggahan sebanyak 13,1 ribu. Seringkali akun Instagram @narasi.tv menjadi sorotan ketika membahas topik tertentu karena konten-konten yang dianggap tajam dan berani dalam mengkritik pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bisa dimanfaatkan untuk menjadi referensi penelitian yang dikaji oleh peneliti, dengan menjauhi beberapa asumsi mengenai dengan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian yang dilaksanakan Aldi Ashar Mappa (Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin) dengan judul “Analisis *Framing* Gerakan Sosial menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam Akun Instagram @gejayamemanggil”, 2020. Penelitian ini membahas tentang *framing* yang dilakukan oleh akun Instagram @gejayamemanggil dengan menggunakan teori *framing* model William A. Gamson dan Andre Modigliani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Framing* gerakan sosial menolak RKUHP pada akun Instagram gejayan memanggil membingkai RKUHP dengan penggunaan berbagi elemen untuk mengarahkan RKUHP sebagai sesuatu yang harus ditolak pengesahannya dan kemudian direvisi dengan melibatkan sipil. Selain *framing* penolakan terhadap pengesahan RKUHP akun Instagram @gejayamemanggil juga melakukan *framing* terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara negatif.
2. Penelitian yang dilaksanakan Maulidatus Syahrotin Naqqiyah dan Ilmy Firdaus Hafidz dengan judul “*Framing* Media William Gamson dan Modigliani: Pemberdayaan Perempuan Dalam Film Charlie’s Angel”, 2024. Penelitian ini menganalisis film Charlie’s Angels menggunakan pendekatan *framing* media Gamson dan Modigliani untuk mengeksplorasi bagaimana film tersebut membingkai isu-isu gender, kekuasaan, dan pemberdayaan perempuan. Dengan menelaah elemen-elemen *framing* seperti metafora, *catchphrase*, dan simbol budaya, penelitian ini menemukan bahwa film ini secara sadar membentuk narasi pemberdayaan perempuan sebagai respons terhadap dinamika sosial modern, khususnya dalam konteks feminisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa Charlie’s Angels berhasil membingkai perempuan sebagai agen perubahan yang kompeten dan berdaya, menciptakan narasi yang sejalan dengan tren kesetaraan gender di media kontemporer.
3. Penelitian yang dilaksanakan Taufik Hidayat (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas) berjudul “Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil

Sumbar Dalam Aksi Penyelamatan Kpk Di Kota Padang Pada Tahun 2015 (Studi: *Framing Process* dan Mobilisasi Sumberdaya yang dilakukan LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam Aksi Save KPK Terkait Konflik KPK dengan Polri Jilid 3)”, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses *framing* dan proses Mobilisasi dalam gerakan penyelamatan KPK oleh LBH Padang dan PUSaKO Unand. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama: pertama, LBH Padang dan PUSaKO Unand berhasil melakukan framing terhadap isu pelemahan KPK dalam konteks Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS). Proses ini dimulai dari identifikasi permasalahan, yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai media seperti media sosial, cetak, dan elektronik guna membangun kesadaran publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung KPK. Kedua, mobilisasi sumber daya berhasil dijalankan oleh kedua lembaga tersebut, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti kalangan akademisi, guru besar, Rektor Unand, organisasi non-pemerintah (NGO), mahasiswa, hingga masyarakat umum di Sumatera Barat. Semua elemen ini turut serta dalam berbagai bentuk aksi dukungan terhadap KPK di wilayah tersebut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

1.	Peneliti	Aldi Ashar Mappa, 2020. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
	Judul Penelitian	“Analisis <i>Framing</i> Gerakan Sosial menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam Akun Instagram @gejayanmemanggil” (Skripsi)
	Kontribusi pada Penelitian	Menjadi rujukan peneliti untuk melaksanakan penelitian terhadap gerakan sosial dengan analisis <i>framing</i> .
	Perbedaan Penelitian	Ketidaksamaan pada riset ada di media sosial yang dikaji serta akun media sosial. Peneliti mempergunakan media sosial Instagram serta akun

		Instagram @narasi.tv.
2.	Peneliti	Maulidatus Syahrotin Naqqiyah & Ilmy Firdaus Hafidz
	Judul Penelitian	Framing Media William Gamson dan Modigliani: Pemberdayaan Perempuan Dalam Film Charlie's Angel (Jurnal)
	Kontribusi pada Penelitian	Menjadi rujukan peneliti terkait pengimplementasian <i>Framing</i> Model William Gamson dan Modigliani.
	Perbedaan Penelitian	Ketidaksamaan objek penelitian
3.	Peneliti	Taufik Hidayat
	Judul Penelitian	Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Dalam Aksi Penyelamatan Kpk Di Kota Padang Pada Tahun 2015 (Studi: <i>Framing Process</i> dan Mobilisasi Sumberdaya yang dilakukan LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam Aksi Save KPK Terkait Konflik KPK dengan Polri Jilid 3) (Skripsi)
	Kontribusi pada Penelitian	Menjadi referensi bagi penelitian penulis dan membantu dalam proses penyusunan penelitian mengenai penelitian yang mempergunakan teori gerakan sosial.
	Perbedaan Penelitian	Ketidaksamaan objek penelitian

2.3 Analisis *Framing*

Analisis *framing* yakni satu di antara metode dalam analisis media, serupa dengan analisis isi serta analisis semiotik. *Framing* berfungsi sebagai cara guna "membingkai" suatu peristiwa, atau dengan kata lain, dipergunakan guna

memahami sudut pandang yang diterapkan oleh wartawan atau media massa saat memilih isu serta menyajikan berita.

Framing adalah metode penyajian realitas yang mana kebenaran mengenai sebuah peristiwa tidak diabaikan sepenuhnya, tetapi sedikit diselewengkan dengan memberi penekanan pada aspek-aspek tertentu. Penegasan sejumlah aspek tertentu dari sebuah isu berhubungan dengan cara penyampaian fakta. Saat aspek tertentu dari sebuah kejadian dipilih, cara aspek tersebut ditulis menjadi penting. Pendekatan *framing* digunakan guna memahami bagaimana realitas dibentuk oleh media.

Perbedaan *framing* sebuah berita oleh masing-masing media dapat menjelaskan berbagai hal, seperti siapa yang mendukung siapa, siapa lawan siapa, siapa yang menjadi patron, serta siapa yang menjadi klien. Kebijakan redaksional ini menjadi pedoman untuk menentukan peristiwa apa yang layak diangkat dan dijadikan berita, bahkan sampai pada komentar yang diberikan.

Selain kebijakan redaksional, kepentingan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi bagaimana sebuah media mengulas berita tertentu. Kepentingan itu bisa diidentifikasi dengan menganalisis secara mendalam berita yang disajikan, apakah berfokus pada kepentingan pemerintah, pemilik modal, atau rakyat.

Pembingkaian adalah sebuah proses konstruksi, yang artinya realitas diberi makna serta dibentuk ulang dengan cara serta makna tertentu. Dampaknya, hanya bagian-bagian tertentu yang dianggap lebih memiliki makna, lebih diperhatikan, dianggap penting, serta lebih mudah diingat oleh khalayak. Pada praktiknya, analisis *framing* sering dipergunakan dalam mengkaji bingkai yang diterapkan oleh surat kabar, sehingga terlihat bahwasanya tiap surat kabar sebenarnya mempunyai kebijakan politiknya sendiri.

Mengacu pada pandangan Eriyanto (2012:156), William Gamson yakni satu di antara pakar yang banyak menulis tentang *framing*. Meskipun Gamson seorang sosiolog, ia punya minat khusus pada studi media. Fokus paling penting Gamson ada dalam gerakan sosial, dan pengamatan mulanya mengenai *framing* berhubungan dengan topik tersebut. Mengacu pada Gamson, keseuksesan sebuah gerakan sosial tergantung pada cara kejadian dibingkai dengan demikian mampu

mendorong perilaku kolektif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan interpretasi serta pemberian makna simbolis yang bisa diterima secara kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah gerakan sosial bisa dinilai oleh sejumlah faktor, satu di antaranya yakni kemampuan untuk mendefinisikan masalah sosial, menjelaskan masalah tersebut, dan menunjukkan cara penyelesaiannya.

Analisis *framing* yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani menjelaskan bahwa analisis ini merupakan persepsi yang digunakan oleh wartawan untuk memilah isu-isu yang ada. Perspektif ini menekankan pada cara pemilihan fakta, penekanan pada aspek tertentu, serta penghilangan informasi yang dianggap tidak relevan, yang pada akhirnya memengaruhi arah penyampaian isi media (2012:261).

Mereka menyebut konsep ini sebagai "kemasan" (*package*). Dalam pandangan mereka, *frame* dapat dipahami sebagai cara bercerita atau kumpulan ide yang terorganisir secara optimal, yang menciptakan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan objek wacana tertentu. Kemasan ini terdiri dari serangkaian ide yang menggambarkan isu yang sedang dibahas serta peristiwa yang relevan (2012:262). Eriyanto menambahkan bahwa dalam model Gamson dan Modigliani, kondisi kemasan sangat bergantung pada adanya gagasan sentral yang didukung oleh berbagai perangkat wacana, seperti kata-kata, kalimat, serta elemen visual seperti gambar atau grafik. Semua elemen ini berfungsi untuk merujuk pada suatu ide dan memperkuat gagasan sentral dari isi media tersebut.

Eriyanto juga menekankan bahwa dalam model Gamson dan Modigliani, kemasan sangat bergantung pada keberadaan gagasan sentral yang didukung oleh berbagai perangkat wacana, termasuk kata-kata, kalimat, serta elemen visual seperti gambar atau grafik. Semua elemen ini diarahkan untuk membangun dan mendukung gagasan sentral dari isi media yang disampaikan.

2.3.1 *Condensing Symbols*

Framing analysis yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani memandang wacana media sebagai kumpulan perspektif interpretasi (*interpretative package*) yang digunakan untuk membangun dan memberikan makna terhadap suatu isu.

Analisis ini berfokus pada interaksi perangkat simbolik, seperti *Framing Devices* dan *reasoning devices*, yang menjadi dasar dalam membentuk perspektif. Simbol-simbol dalam wacana dianggap transparan ketika mampu menyisipkan perangkat bermakna yang berfungsi sebagai panduan untuk mewakili sesuatu yang lain.

2.3.2 *Framing Devices*

Struktur *Framing Devices* meliputi metafora (*Metaphors*), contoh-contoh (*exemplars*), slogan (*Catchphrases*), penggambaran (*Depictions*), dan citra visual (*Visual Images*). Perangkat ini menekankan cara pandang atau cara "melihat" suatu isu.

Berikut ialah penjabaran terkait delapan unsur dalam perangkat *framing*:

Tabel 2. Perangkat Framing Model Gamson dan Modigliani

<i>Framing Devices</i> (Perangkat Framing) (Penggunaan kata, kalimat, serta grafis)	<i>Reasoning Devices</i> (Perangkat Penalaran) (Korelasi antara teks dengan gagasan tertentu)
<i>Metaphors</i> <i>Metaphors</i> atau metafora adalah penggunaan perbandingan atau representasi simbolis untuk menjelaskan atau menggambarkan ide atau konsep yang lebih abstrak dengan merujuk pada hal-hal yang lebih konkret atau dikenal.	<i>Roots</i> <i>Roots</i> merujuk pada identifikasi atau penjelasan mengenai asal-usul atau akar dari suatu masalah atau isu yang sedang dibahas. Konsep ini berfungsi untuk memberikan konteks yang lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi.
<i>Catchphrases</i> <i>Catchphrases</i> adalah ungkapan atau kalimat yang mudah diingat dan sering digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu, baik dalam konteks iklan,	<i>Appeals to principle</i> <i>Appeals to principle</i> merujuk pada argumen yang mengedepankan nilai-nilai moral, etika, atau prinsip dasar untuk mendukung suatu posisi atau

politik, maupun budaya populer. <i>Catchphrases</i> digunakan untuk memahami bagaimana bahasa memengaruhi opini publik atau membentuk identitas budaya. Frasa ini sering digunakan untuk menarik perhatian dan menciptakan dampak emosional.	tindakan. Konsep ini berfungsi untuk mengaitkan isu yang sedang dibahas dengan prinsip-prinsip yang lebih universal dan diterima secara luas oleh masyarakat.
<i>Exemplaar</i> <i>Exemplaar</i> adalah contoh-contoh yang dianggap khas atau mewakili kategori atau konsep tertentu. <i>Exemplaar</i> biasa digunakan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan fenomena atau teori yang sedang diteliti dengan cara menghubungkan bingkai dengan contoh, uraian (dapat teori, perbandingan) yang menegaskan bingkai.	<i>Consequences</i> <i>Consequences</i> merujuk pada hasil atau dampak yang mungkin timbul dari suatu tindakan, kebijakan, atau fenomena. Konsep ini berfungsi untuk menunjukkan kepada audiens apa yang dapat terjadi jika suatu keputusan diambil atau jika suatu isu tidak ditangani dengan baik.
<i>Depiction</i> <i>Depiction</i> adalah penggambaran sebuah isu, objek, ide, atau konsep melalui kata-kata, gambar, atau simbol yang bersifat konotatif. <i>Depiction</i> ini biasanya berbentuk kosakata, leksikon guna memberi label sesuatu. <i>Depiction</i> digunakan untuk menganalisis bagaimana sesuatu digambarkan atau disajikan dalam media atau teks tertentu. Ini bisa mencakup visual,	

narasi, atau representasi ideologis.	
Visual Images <i>Visual Images</i> merujuk pada representasi atau gambaran yang berbentuk visual, seperti foto, ilustrasi, grafik, atau desain lainnya. <i>Visual Image</i> dalam penelitian berfokus pada bagaimana gambar-gambar ini berfungsi untuk menyampaikan pesan, membentuk pemahaman, dan memengaruhi persepsi dalam masyarakat atau konteks tertentu.	

2.4 Gerakan Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan sosial didefinisikan sebagai tindakan atau agitasi yang secara sengaja dirancang oleh sekelompok masyarakat, yang dilengkapi dengan program tertentu dan bertujuan untuk mendorong perubahan atau mempertahankan pola serta lembaga sosial yang telah ada. Dalam kajian sosiologi, gerakan sosial dipahami sebagai salah satu bentuk perilaku kolektif. Beberapa sosiolog menekankan pentingnya aspek kolektivitas dalam gerakan ini, sementara yang lain juga menambahkan unsur kesengajaan, organisasi, dan kesinambungan sebagai ciri khasnya. Sebagai bentuk tindakan kolektif, gerakan sosial telah hadir sejak masa awal perkembangan peradaban manusia. Pergeseran dari satu peradaban ke peradaban berikutnya tidak selalu berlangsung secara damai sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali dimediasi oleh aksi kolektif, yang kini dikenal sebagai gerakan sosial (Situmorang, 2007).

Secara umum, gerakan sosial memiliki pengertian yang luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan. Menurut Jary dan Jary (1995: 614–615), gerakan sosial didefinisikan sebagai "sebuah aliansi besar dari individu yang bersatu untuk mendorong atau menghalangi suatu aspek perubahan sosial dalam masyarakat."

Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta (1992) menjelaskan bahwa gerakan sosial secara umum adalah tindakan kolektif yang bertujuan untuk mendorong atau menolak perubahan dalam masyarakat atau kelompok. Sejalan dengan pandangan ini, J. Craig Jenkins dan William Form (2005: 331) mendefinisikan gerakan sosial sebagai usaha terorganisir untuk menciptakan perubahan sosial.

Darmawan Triwibowo (2006) menambahkan bahwa gerakan sosial merupakan aksi kolektif yang secara jelas memiliki orientasi konflik terhadap pihak-pihak sosial atau politik tertentu. Aksi ini dilakukan melalui jaringan lembaga yang saling terhubung, di mana para pelakunya terikat oleh solidaritas dan identitas kolektif yang kuat, melampaui sekadar koalisi atau kampanye bersama.

Bernard Raho (2014) juga mendefinisikan gerakan sosial sebagai aktivitas terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, dengan tujuan mendukung atau menentang isu tertentu. Lauer (1976: xiv) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah usaha bersama untuk mengarahkan atau mengendalikan proses perubahan.

Sebuah definisi yang memadai mengenai gerakan sosial harus mampu membedakan fenomena ini dari kategori sosial lainnya dan dari anggota lain dalam kategori yang sama. Definisi tersebut perlu mencakup beberapa elemen, yaitu:

1. Keterlibatan sekelompok orang yang bertindak secara kolektif.
2. Adanya tujuan bersama yang diarahkan pada perubahan tertentu dalam masyarakat, sebagaimana ditetapkan dan dipahami bersama oleh para partisipan.
3. Kolektivitas dalam gerakan sosial cenderung tersebar, namun tingkat keterikatannya tetap lebih rendah dibandingkan organisasi formal.
4. Tindakan dalam gerakan sosial memiliki tingkat spontanitas yang relatif tinggi, tidak bersifat institusional, dan bentuknya cenderung tidak konvensional.

Dengan demikian, gerakan sosial dapat dipahami sebagai aksi kolektif yang terorganisir secara longgar dan tidak memiliki struktur kelembagaan formal, yang

bertujuan untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat (Sztompka, 2004: 325). Gerakan sosial berbeda dari perilaku kolektif karena memiliki tujuan atau kepentingan bersama yang jelas (Giddens, 1989). Menurut Bernard Raho (2014), terdapat tiga perbedaan utama antara keduanya, yaitu tingkat organisasi yang relatif kuat, keberlanjutan dalam jangka panjang, serta adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah tatanan sosial secara menyeluruh. Selain itu, gerakan sosial biasanya memiliki orientasi jangka panjang untuk mengubah atau mempertahankan struktur sosial dan institusi yang ada. Giddens (1989) dan Light, Keller, serta Calhoun (1989), sebagaimana dikutip oleh Kamanto Sunarto (2004), juga mencatat bahwa gerakan sosial sering menggunakan metode yang berada di luar mekanisme institusional formal.

Selain dibedakan dari perilaku kolektif, gerakan sosial juga memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan gerakan massa, meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan. Dalam konteks gerakan sosial, tujuan yang ingin dicapai dinyatakan secara eksplisit, begitu pula cara atau sarana yang digunakan untuk mencapainya. Fakta lainnya menunjukkan bahwa meskipun gerakan sosial cenderung tidak bersifat institusional, ia tetap merupakan suatu bentuk gerakan yang terorganisir, berlangsung secara berkelanjutan, dan mencerminkan kesadaran kolektif para anggotanya sebagai bagian dari identitas bersama (Jurdi, 2010: 132).

2.4.1 Jenis-jenis Gerakan Sosial

Banyaknya jenis-jenis gerakan sosial mendorong banyak ahli sosiologi untuk mengelompokkannya berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu perbedaan utama dalam gerakan sosial adalah fokusnya, di mana beberapa gerakan menargetkan kelompok orang atau kategori populasi tertentu, sementara yang lain berorientasi pada perubahan di seluruh masyarakat. Tidak hanya itu, terdapat gerakan sosial yang memperjuangkan perubahan yang terbatas hanya untuk sebagian kecil populasi, dan ada pula gerakan yang bertujuan untuk membawa perubahan menyeluruh dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan kedua perbedaan ini, Macionis (1987: 598–599) mengemukakan berbagai jenis gerakan sosial.

Tabel 3. Tipe Gerakan Sosial

Besaran	Tipe	
	Perubahan Perorangan	Perubahan sosial
Sebagian	Gerakan Alternatif (Gerakan yang bertujuan mendorong perubahan terbatas pada tingkat individu dengan membujuk mereka untuk meninggalkan sikap dan perilaku tertentu, serta mengadopsi sikap dan perilaku alternatif)	Gerakan Reformatif (Gerakan yang bertujuan membawa perubahan sosial yang terbatas pada masyarakat sebagai satu keseluruhan)
Menyeluruh	Gerakan Redemptif (Gerakan ini berupaya mewujudkan perubahan besar pada diri individu. Berbeda dengan gerakan sosial alternatif yang hanya menargetkan perubahan terbatas pada sikap atau perilaku tertentu, gerakan ini menginginkan transformasi yang menyeluruh dalam diri)	Gerakan Revolusioner (Gerakan ini berusaha membawa perubahan yang bersifat revolusioner pada masyarakat secara keseluruhan)

	individu)	
--	-----------	--

Kornblum mengemukakan klasifikasi lain mengenai gerakan sosial yang didasarkan pada tujuan gerakan tersebut, berbeda dari pendekatan yang digunakan oleh Aberle (Kornblum, 1988: 233–236 dalam Kamanto Sunarto). Berdasarkan kriteria ini, Kornblum mengelompokkan gerakan sosial ke dalam empat kategori utama: gerakan revolusioner, gerakan reformis, gerakan konservatif, dan gerakan reaksioner.

Gerakan dikategorikan sebagai gerakan revolusioner apabila memiliki tujuan untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap struktur institusional dan sistem stratifikasi sosial. Revolusi sosial sendiri diartikan sebagai perubahan radikal terhadap keseluruhan tatanan sosial, termasuk sistem pemerintahan dan struktur stratifikasi (Kornblum, 1988: 250 dalam Kamanto Sunarto). Contoh nyata dari jenis gerakan ini adalah Revolusi Rusia tahun 1917 dan Revolusi Tiongkok tahun 1949.

Jika suatu gerakan hanya berfokus pada perubahan sebagian institusi dan nilai-nilai tertentu, maka gerakan tersebut termasuk dalam kategori gerakan reformis. Contoh dari gerakan ini adalah Boedi Oetomo yang didirikan di Jakarta pada tahun 1908, yang bertujuan memperkenalkan pendidikan formal ala Barat kepada anak-anak pribumi (Nagazumi, 1989 dalam Kamanto Sunarto).

Sebaliknya, gerakan yang berupaya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai serta institusi yang sudah ada diklasifikasikan sebagai gerakan konservatif. Contohnya adalah gerakan feminis di Amerika Serikat pada dekade 1980-an yang mendorong amandemen konstitusi demi menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, suatu gerakan disebut gerakan reaksioner apabila tujuannya adalah mengembalikan sistem institusi dan nilai-nilai dari masa lampau, dengan menolak nilai-nilai yang berkembang saat ini. Sebuah contoh dari jenis gerakan ini adalah gerakan Pauline Hanson melalui partai One Nation di Australia, yang menentang arus migrasi dan menolak pemberian hak-hak khusus bagi masyarakat Aborigin.

2.4.2 Tahap-tahap dalam Gerakan Sosial

Keberlanjutan sebuah gerakan sosial sangat ditentukan oleh seberapa efektif organisasi yang mendukungnya. Meskipun demikian, terdapat pula jenis gerakan sosial yang menolak pembentukan organisasi formal sebagai sarana perjuangan. Contohnya adalah Gerakan Kaum Hippy di Amerika Serikat pada era 1960-an, yang menganut prinsip "lakukan semuanya sendiri" dan menolak struktur organisasi yang bersifat kaku (Macionis, 1987: 606 dalam Bernard Raho, 2014). Namun, gerakan seperti ini umumnya tidak mampu bertahan lama dan cenderung bubar setelah beberapa tahun.

Dalam konteks ini, efektivitas organisasi dalam gerakan sosial tidak dapat diabaikan, karena organisasi mampu memberikan koordinasi, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat dan memperpanjang masa eksistensi gerakan tersebut. Sebaliknya, gerakan yang bersifat informal dan tidak terstruktur, meskipun memiliki kekuatan dalam hal inovasi dan kebebasan, sering kali mengalami kesulitan dalam mempertahankan momentum dan mencapai tujuan jangka panjang. Akibatnya, mereka sering kali mengalami disintegrasi setelah periode aktif tertentu.

Sementara itu gerakan sosial yang didukung oleh organisasi terstruktur, seperti gerakan hak-hak sipil untuk warga kulit hitam, gerakan feminisme, dan gerakan hak-hak kaum gay, cenderung lebih tahan lama dan mencapai kesuksesan. Meskipun setiap gerakan sosial memiliki keunikan masing-masing, kebanyakan dari mereka mengikuti pola perkembangan yang serupa, terdiri dari empat tahap utama:

- Tahap Pemunculan: Gerakan sosial lahir dari ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Beberapa gerakan, seperti gerakan hak-hak sipil atau gerakan perempuan, muncul dari ketidakadilan dalam masyarakat, sedangkan gerakan lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu tertentu, seperti gerakan lingkungan hidup.
- Tahap Pembentukan Organisasi: Setelah muncul, sebuah gerakan sosial umumnya mulai membentuk struktur organisasi yang lebih formal. Pada tahap ini, pengembangan kepemimpinan, perumusan kebijakan dan strategi, serta

upaya membangun kepercayaan masyarakat menjadi hal yang sangat krusial. Selain itu, perekrutan anggota baru juga dilakukan untuk memperkuat basis gerakan. Aksi kolektif seperti unjuk rasa kerap digunakan sebagai sarana untuk menarik perhatian publik dan memperoleh legitimasi. Dalam hal ini, media massa berperan penting dalam membantu menyebarkan pengaruh gerakan tersebut.

- Tahap Birokratisasi: Seiring bertambahnya anggota dan kompleksitas gerakan, struktur birokrasi mulai terbentuk. Awalnya, pengaruh gerakan sering bergantung pada kharisma pemimpin, namun untuk menjaga kelangsungan, diperlukan struktur organisasi yang lebih formal. Meskipun organisasi birokratis mendukung stabilitas gerakan, birokratisasi yang berlebihan bisa membuat gerakan kehilangan fokus dan energi perjuangannya.
- Tahap Berakhirnya Gerakan Sosial: Setiap gerakan sosial pada akhirnya akan mencapai masa akhirnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor: keberhasilan mencapai tujuan; kegagalan akibat lemahnya kepemimpinan, kurangnya sumber daya, atau tekanan dari pihak berkuasa; kooptasi pemimpin oleh kekuasaan; represi keras dari pemerintah; atau karena gerakan tersebut telah diintegrasikan ke dalam sistem yang ada sehingga kehilangan karakter oposisionernya.

2.5 Gerakan Sosial Baru

Aldi Ashar Mappa (2020) menjelaskan bahwa sejarah mencatat adanya akumulasi berkelanjutan dari berbagai perlawanan politik serta gerakan penentangan atas kekuasaan yang dinilai otoriter serta represif di penjuru dunia. Revolusi Prancis dan Konstitusi Polandia tahun 1791 sering dianggap oleh para ahli sebagai titik awal kemunculan gerakan sosial modern. Selama abad ke-19, gerakan sosial semakin berkembang melalui munculnya gerakan buruh serta sosialisme, yang kemudian berkontribusi pada pembentukan negara-negara komunis serta organisasi dan partai demokrasi sosial. Setelah PD II, gerakan sosial ini mulai menunjukkan karakteristik yang tidak sama dari periode sebelumnya, dengan fokus pada perubahan serta reformasi radikal.

Para pakar biasanya sepakat bahwasanya di sejumlah dekade terakhir, variasi, frekuensi, serta intensitas gerakan serta pertentangan politik makin meningkat serta menjadi lebih rumit. Hal ini terlihat, misalnya, dari hadirnya gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat (1955-1969), gerakan perdamaian, gerakan lingkungan, feminisme, juga pertentangan terhadap rezim otoriter di Eropa dan negara-negara berkembang, yang menggerakkan massa untuk turun ke jalan dengan tuntutan perubahan. Pergerakan serupa juga dilaksanakan oleh kelompok ekstremis Islam serta Yahudi di Timur Tengah, militant Hindu di India, serta kelompok fundamentalis di bekas wilayah Uni Soviet. Lebih baru lagi, sejak awal 1990-an hadir gerakan sosial yang memiliki taraf skala global yang disebut dengan gerakan anti-globalisasi.

Kata gerakan sosial baru dipakai secara luas guna mengacu pada beragam fenomena gerakan sosial yang hadir dari pertengahan 1960-an. Para pakar sudah mencermati gejala sosial ini secara intens. Hasilnya yakni bahwasanya pada komunitas ilmu sosial, gerakan sosial baru dipahami menjadi dua hal. Pertama, gerakan sosial baru dipahami menjadi sebuah tipe gerakan sosial yang punya wujud karakter yang baru serta unik. Kedua, akumulasi wawasan yang diciptakan dari riset mengenai gerakan sosial baru sudah menuntunnya pada status sebagai sebuah paradigma (cara pandang atas sebuah objek permasalahan) untuk memahami fakta sosial itu sendiri (Pichardo, 1997; Singh, 2001).

Hakikatnya gerakan sosial baru hadir menjadi respons atas pergantian wujud-wujud gerakan sosial kontemporer di sejumlah negara Barat yang berkaitan dengan berkembangnya suatu dunia pasca-modern atau pasca industrial (Pichardo, 1997: 411). Dengan majunya perkembangan tatanan sosial serta peradaban di Barat, para pakar memandang bahwasanya gerakan sosial di sana menunjukkan perubahan karakter dibandingkan dengan gerakan sosial sebelumnya, yang disebut sebagai gerakan sosial “lama” atau tradisional. Gerakan sosial tradisional umumnya punya tujuan yang berfokus pada aspek ekonomi-material, seperti yang terlihat pada gerakan buruh. Gerakan buruh pernah jadi salah satu gerakan besar serta berpengaruh pada masa ketika negara-negara di Eropa serta Amerika Serikat memasuki era industri pada abad ke-19 serta

permulaan abad ke-20. Gerakan ini turut menjadi dasar bagi terbentuknya partai politik buruh serta komunis.

Di sisi lain, gerakan sosial baru cenderung berfokus terhadap beberapa tujuan non-material. Gerakan ini lebih berfokus pada perubahan dalam gaya hidup serta budaya dibanding perubahan spesifik pada kebijakan publik atau ekonomi, seperti yang terlihat pada gerakan lingkungan, anti-perang, perdamaian, feminisme, serta sejenisnya (Nash, 2005).

Tanpa dukungan sumber daya, keterlibatan dalam tindakan yang sarat dengan kepentingan menjadi tidak logis (Ishiyama, 2013: 376). Hal ini dapat dimaklumi karena setiap gerakan sosial membutuhkan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas kolektifnya.

McCarthy dan Zald menyatakan bahwa gerakan sosial memiliki peran penting dalam menggalang dukungan serta mengelola sumber daya. Jika dilakukan secara efektif, upaya ini dapat menarik perhatian dan simpati baik dari kalangan elite maupun masyarakat umum terhadap tujuan yang diusung oleh gerakan tersebut (Hidayat, 2012: 23). Inilah inti dari konsep Mobilisasi Sumber Daya, yang berusaha memahami bagaimana sebuah kelompok menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mendorong perubahan sosial dan mencapai tujuan kolektifnya (Edwards dan McCarthy, 2004: 118). Konsep ini menyoroti motivasi yang mendorong pencapaian tujuan oleh gerakan sosial.

Istilah “sumber daya” dalam konteks ini mencakup makna yang luas dan merujuk pada segala sesuatu yang dimiliki gerakan sosial, seperti kekuatan finansial, akses ke media, dukungan dari simpatisan, serta loyalitas kelompok. Sumber daya juga bisa berupa kepemilikan fisik seperti gedung, pengetahuan yang tersedia (stock of knowledge), keterampilan (skill) individu, termasuk ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh gerakan (Opp, 2009). Namun demikian, tidak semua hal yang berguna dapat langsung dikategorikan sebagai sumber daya; sesuatu baru dapat disebut sumber daya apabila memenuhi kriteria tertentu yang berkaitan dengan penggunaannya oleh individu atau aktor gerakan harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya yang memiliki nilai dan manfaat.

Dalam ranah gerakan sosial, selain pentingnya ketersediaan sumber daya, mobilisasi juga merupakan aspek yang tak kalah vital. Gerakan sosial harus mampu menggerakkan sumber daya yang dimiliki agar dapat merealisasikan tujuannya secara konkret. Tanpa proses mobilisasi, ide-ide yang ada hanya akan berhenti sebagai konsep tanpa implementasi. Oleh karena itu, mobilisasi menjadi elemen krusial dalam gerakan sosial, di mana kepemimpinan memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilannya.

Sebagaimana disampaikan oleh McCarthy, pemimpin memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung gerakan sosial (Situmorang, 2007: 40–41). McCarthy dan Zald juga menekankan sejumlah faktor kunci dalam proses mobilisasi sumber daya, seperti basis dukungan, strategi dan pendekatan yang dipilih, serta interaksi dengan masyarakat luas. Mobilisasi menjadi langkah strategis utama setelah sumber daya tersedia, karena melalui proses inilah sumber daya dapat dimanfaatkan secara nyata demi mencapai tujuan gerakan.

Teori Mobilisasi Sumber Daya menyoroti dua aspek utama. Pertama, berkaitan dengan berbagai jenis sumber daya baik yang bersifat fisik, non-fisik, maupun finansial yang dimiliki oleh suatu gerakan, seperti jaringan sosial, dana, pengetahuan, atau keahlian tertentu. Sumber daya ini dapat dikelola oleh individu maupun secara kolektif oleh kelompok demi mendukung pencapaian tujuan gerakan. Kedua, mobilisasi merupakan proses integral, di mana para pelaku gerakan berupaya memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendorong tercapainya cita-cita mereka. Kedua aspek tersebut pengelolaan dan mobilisasi sumber daya harus dijalankan secara terpadu karena sinergi keduanya sangat menentukan keberhasilan gerakan sosial.

Gerakan sosial sendiri memiliki cakupan pengertian yang luas karena sifatnya yang sangat beragam. Partisipasi dalam gerakan ini bisa melibatkan hanya segelintir orang, hingga mencakup ribuan bahkan jutaan peserta. Gerakan sosial juga bisa beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku di suatu masyarakat, tetapi tidak jarang pula bergerak di luar batas legalitas sebagai kelompok bawah tanah (*underground*).

Tarrow mengklasifikasikan gerakan sosial dalam cakupan yang lebih luas sebagai bagian dari politik perlawanan (*contentious politics*). Politik perlawanan mencakup berbagai bentuk aksi kolektif, termasuk gerakan sosial, siklus penentangan (*cycles of contention*), serta revolusi. Fenomena ini muncul ketika kelompok masyarakat biasa bergabung dengan individu-individu yang memiliki pengaruh lebih besar, bersatu untuk menantang kaum elit, pemegang kekuasaan, atau pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan.

Perlawanan semacam ini umumnya muncul dalam konteks perubahan peluang dan hambatan politik yang menciptakan momentum bagi para aktor sosial untuk bertindak, terutama ketika mereka memiliki sumber daya yang mendukung aksi mereka. Ketika aksi perlawanan didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan diperkuat oleh resonansi budaya serta simbol-simbol perjuangan yang relevan, maka politik perlawanan dapat menciptakan pola interaksi yang terus-menerus dengan pihak lawan. Dalam jangka panjang, proses ini berkontribusi pada lahirnya gerakan sosial.

Tarrow menjelaskan bahwa inti dari politik perlawanan terletak pada aksi kolektif yang mengandung unsur konflik atau aksi kolektif yang bersifat menantang (*contentious collective action*). Bentuk aksi ini bisa sangat beragam, mulai dari yang singkat hingga berlangsung lama, bersifat terorganisir maupun sementara, serta bervariasi dari tindakan yang biasa saja hingga yang bersifat dramatis. Sebagian besar aksi kolektif terjadi dalam kerangka institusional, di mana para partisipan berusaha mencapai tujuan bersama. Namun, aksi ini seringkali mengandung unsur konflik, terutama ketika dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap institusi formal untuk menyuarakan tuntutan baru, atau ketika tuntutan tersebut dianggap tidak dapat diterima oleh pihak berwenang maupun kelompok yang menjadi sasaran perlawanan.

Aksi kolektif yang menentang ini menjadi fondasi utama bagi terbentuknya gerakan sosial, karena dalam banyak kasus, merupakan satu-satunya alat yang dimiliki masyarakat sipil untuk menghadapi kekuatan yang lebih dominan, seperti negara. Meski begitu, tidak semua bentuk perlawanan politik yang muncul secara

global dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial. Menurut Tarrow, agar suatu bentuk aksi memenuhi syarat sebagai gerakan sosial, ia harus memenuhi empat karakteristik utama. Karakteristik-karakteristik inilah yang menjadi indikator penting dalam membedakan gerakan sosial dari bentuk perlawanan politik lainnya.

Dengan demikian, Tarrow menegaskan pentingnya memahami elemen-elemen kunci yang menyusun aksi kolektif dan gerakan sosial, yang dapat memberikan wawasan tentang dinamika perlawanan dalam konteks politik saat ini dan bagaimana masyarakat sipil dapat berinteraksi dengan kekuatan yang ada.

a. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Gerakan sosial memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan bentuk tindakan kolektif lainnya, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau bermain sepak bola. Perbedaan utamanya terletak pada karakteristik khas berupa adanya tantangan kolektif. Menurut Tarrow, gerakan sosial senantiasa ditandai oleh aksi perlawanan melalui tindakan langsung yang bersifat mengganggu. Aksi ini biasanya ditujukan kepada para elite, penguasa, kelompok-kelompok lain, maupun norma budaya tertentu. Tantangan kolektif tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengganggu, menghambat, atau menimbulkan ketidakpastian terhadap aktivitas yang dijalankan oleh pihak-pihak yang dianggap menindas.

Dalam konteks sistem yang represif, tantangan kolektif sering kali termanifestasi melalui penggunaan simbol-simbol tertentu, seperti slogan, pola pakaian khas, dan musik tertentu, atau melalui pengenalan objek-objek yang dikenal dengan makna yang berbeda atau baru. Faktor-faktor simbolis ini berfungsi untuk memperkuat identitas kolektif dan tiada henti mendesak perubahan.

Tantangan kolektif diakui sebagai karakteristik paling mendasar dari gerakan sosial, yang diakibatkan oleh kondisi gerakan tersebut yang seringkali terbatas dalam hal sumber daya yang stabil, seperti dana, organisasi, atau akses terhadap lembaga pemerintahan. Dalam pencarian mereka untuk menjangkau konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim yang ingin disampaikan, penentangan menjadi satu-satunya sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan sosial.

Akibatnya, gerakan-gerakan tersebut sering menggunakan tantangan kolektif sebagai cara untuk menjadi titik fokus bagi para pendukungnya. Hal tersebut juga bertujuan untuk menarik perhatian dari pihak lawan serta dari pihak ketiga yang mungkin memiliki pengaruh dalam proses perubahan.

Dengan demikian, tantangan kolektif dalam gerakan sosial tidak hanya sekadar merupakan bentuk perlawanan, tetapi juga strategi yang efektif untuk membangun solidaritas, menciptakan kesadaran, dan mewujudkan perubahan sosial. Melalui aksi langsung dan simbolisme yang kuat, gerakan sosial dapat mengilhami dan mengorganisir individu-individu untuk bersama-sama menghadapi ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

b. Tujuan Bersama (*common purpose*)

Terdapat beragam alasan yang dapat dijelaskan mengapa individu memutuskan untuk bergabung dalam suatu gerakan sosial. Alasan-alasan ini bervariasi, mulai dari motivasi yang bersifat nakal dan menginginkan untuk mencemooh otoritas, hingga dampak insting kelompok yang sering kali tidak memiliki tujuan yang jelas. Namun, salah satu alasan yang paling menonjol dan meyakinkan dalam memahami keterikatan individu pada gerakan sosial adalah kebutuhan untuk menyusun klaim bersama yang menantang pihak lawan, pemegang kekuasaan, atau elite tertentu.

Proses pengorganisasian dalam gerakan sosial sering kali didorong oleh kesadaran akan ketidakadilan atau penindasan yang dihadapi oleh kelompok tertentu. Tidak semua bentuk konflik dalam gerakan sosial dihasilkan dari kepentingan kelas, tetapi lebih sering, dasar dari tindakan kolektif ini terletak pada nilai dan kepentingan bersama yang diidentifikasi oleh para anggotanya. Dengan kata lain, individu yang terlibat dalam gerakan sosial cenderung memiliki cita-cita atau tujuan yang tumpang tindih, di mana nilai-nilai kolektif ini menjadi landasan untuk mobilisasi dan aksi bersama.

Melalui pengalaman bersama dalam berjuang, individu dapat menciptakan rasa solidaritas dan identitas kolektif yang memperkuat komitmen mereka terhadap gerakan tersebut. Tindakan bersama tidak hanya memberi peluang bagi individu untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem yang ada, tetapi

juga menguatkan hubungan sosial di antara mereka yang berjuang untuk mencapai tujuan yang sama.

Oleh karena itu, meskipun beragam motivasi bisa mendorong seseorang untuk terlibat dalam gerakan sosial, pemahaman tentang klaim kolektif dan nilai-nilai yang sama memiliki dampak yang signifikan dalam membangun solidaritas dan memfasilitasi tindakan bersama. Dalam konteks ini, gerakan sosial dapat dilihat sebagai wadah bagi individu untuk memperjuangkan tujuan yang lebih besar daripada sekadar kepentingan pribadi, menciptakan dampak yang lebih luas dalam masyarakat.

c. Solidaritas dan Identitas Kolektif

Suatu aspek yang menjadi pendorong utama dalam gerakan sosial adalah pertimbangan dari partisipasi individu terhadap kepentingan bersama, yang menjadi jembatan untuk mengubah potensi gerakan menjadi aksi yang konkrit. Konsep common denominator ini berfungsi sebagai elemen persatuan yang krusial, di mana individu dengan berbagai latar belakang dan pengalaman dapat bersatu dalam upaya mencapai tujuan yang sama. Melalui penggalangan konsensus di antara anggotanya, perancangan gerakan sosial memiliki peran sentral dalam merangsang terbentuknya kesepakatan semacam ini.

Pemimpin gerakan sosial, dalam konteks ini, dihadapkan pada tantangan untuk menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas yang dapat menyelaraskan tujuan individu dengan misi kolektif dari gerakan tersebut. Rasa solidaritas dan identitas ini sering kali diperoleh dari elemen-elemen yang kuat seperti nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan religius. Dalam hal ini, pemimpin yang mampu menghubungkan pesannya dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh para pendukung dapat efektif dalam mengajukan klaim serta memobilisasi dukungan yang lebih luas.

Selanjutnya, dengan menciptakan dan menegaskan konsensus di antara para anggota, gerakan sosial tidak hanya memperkuat basis dukungan tetapi juga memudahkan transisi dari sekadar potensi ke dalam aksi yang nyata. Dalam konteks ini, konsensus menjadi alat yang penting dalam membangun legitimasi

dan daya tarik gerakan, sekaligus berfungsi sebagai pengikat antar anggotanya dalam menghadapi tantangan yang ada.

d. Memelihara Politik Perlawanan

Dalam konteks gerakan sosial, pentingnya memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh sebagai elemen sentral dalam proses perlawanan tidak dapat dianggap sepele. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, untuk suatu episode perlawanan dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan, diperlukan tujuan kolektif, identitas yang bersama, serta tantangan yang dapat diidentifikasi oleh para anggotanya. Elemen-elemen ini berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat politik perlawanan, menjadikan aksi kolektif bukan hanya sekadar serangkaian tindakan individual, tetapi suatu manifestasi dari keinginan kolektif untuk mencapai perubahan.

Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara tantangan dan aksi bersama dapat mengakibatkan gerakan tersebut kehilangan arah, berujung pada fragmentasi menjadi bentuk-bentuk ketidakpuasan yang lebih mendalam, seperti kebencian atau kemarahan yang bersifat individual. Dalam beberapa kasus, tanpa kepemilikan yang jelas terhadap tujuan kolektif, gerakan sosial bisa saja bertransformasi menjadi entitas yang lebih sempit, seperti sekte religius, atau malah terjebak dalam isolasi dan ketidakaktifan.

Dengan demikian, interaksi yang berkelanjutan dengan pihak lawan yang memiliki kekuatan lebih merupakan titik kritis yang menandai pergeseran dari sekadar penentangan menuju pembentukan gerakan sosial yang nyata dan terorganisir. Proses ini membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang mampu memelihara dan membangun solidaritas di antara para anggotanya, sambil tetap fokus pada tujuan bersama yang diinginkan. Ketika tantangan dan perlawanan tetap hidup, akan ada dorongan yang lebih besar untuk mengorganisir tindakan kolektif dan melawan kekuatan yang ada.

2.6 Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory*)

Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory* atau RMT) merupakan pendekatan utama dalam kajian gerakan sosial, yang muncul sebagai respons terhadap perspektif perilaku kolektif tradisional. RMT menolak anggapan bahwa faktor emosional, seperti ketidakpuasan atau penderitaan, merupakan penyebab utama terbentuknya gerakan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Singh Yehualashet et al. (2016), para pendukung RMT berpendapat bahwa ketidakpuasan dan empati saja tidak cukup untuk menjelaskan munculnya gerakan sosial. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya—termasuk waktu, dana, dan jaringan organisasi—dalam membangun dan menggerakkan gerakan sosial.

Saat ini, dalam disiplin Sosiologi, teori Mobilisasi Sumber Daya menjadi kerangka dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif (Buechler, 1995). Para teoritikus dalam pendekatan ini mengawali analisisnya dengan menolak penekanan pada aspek emosional seperti "perasaan" (feelings) dan "ketidakpuasan" (grievances), serta kritik terhadap penggunaan kategori psikologis dalam memahami gerakan sosial baru (Cohen dalam Singh, 2010). Fokus utama teori ini adalah pada proses sosial yang memungkinkan kemunculan serta keberhasilan suatu gerakan.

Lebih lanjut, teori ini memberikan perhatian lebih besar pada faktor ekonomi dan politik dibandingkan dengan Teori Masyarakat Massa atau Teori Deprivasi Relatif, dan mengurangi penekanan pada karakteristik psikologis individu yang terlibat dalam gerakan. RMT mengasumsikan bahwa dalam kondisi sosial yang diwarnai oleh ketidakpuasan, potensi munculnya gerakan sosial tetap ada, namun keberhasilan atau kegagalannya sangat bergantung pada efektivitas organisasi dan kepemimpinan dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Salah satu kelompok teoritikus utama dalam pendekatan ini mencakup McAdam, McCarthy, dan Zald. John D. McCarthy dan Mayer N. Zald berpendapat bahwa gerakan sosial bukanlah semata respons spontan terhadap ketidakpuasan, melainkan sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya material seperti waktu, dana, struktur organisasi yang telah ada, serta kemampuan dalam mengelola organisasi. Mereka menyoroti pentingnya kondisi yang memungkinkan

transformasi nilai-nilai menjadi tindakan konkret, serta faktor-faktor yang mendukung terciptanya kerja sama atau bahkan persaingan antarorganisasi gerakan sosial (Singh, 2010: 134).

Menurut pandangan teori ini, partisipasi dalam gerakan sosial dianalisis melalui pendekatan pilihan rasional. Artinya, individu tidak bergabung hanya karena dilatarbelakangi oleh kekecewaan atau ketidakpuasan, tetapi karena mereka memperhitungkan manfaat yang mungkin diperoleh dari keterlibatan tersebut baik berupa perubahan sosial maupun politik. Tanpa dukungan sumber daya organisasi yang memadai, keikutsertaan dalam gerakan sosial akan sulit terwujud.

Zurcher dan Snow Yehualashet et al. (2016) juga menjelaskan bahwa RMT muncul sebagai reaksi terhadap pandangan psikologis yang berfokus pada karakteristik individu dalam berpartisipasi dalam gerakan sosial. Dalam pandangan ini, generasi dan keberlanahan gerakan sosial tidak hanya dipicu oleh pencarian keadilan atau ketidakpuasan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktur serta sumber daya yang dapat dimobilisasi. McCarthy dan Zald, pionir di bidang RMT, berargumen bahwa gerakan sosial tidak selalu merupakan reaksi spontan tetapi juga pengorganisasian yang terencana berdasarkan pada akses terhadap sumber daya yang bermanfaat (Sodjinou et al., 2020).

Dalam konteks mobilisasi sumber daya, aspek nilai dan manfaat dari sumber daya itu sendiri menjadi sangat penting. Ketika aktor-aktor dalam gerakan sosial memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memanfaatkan sumber daya yang berharga baik yang bersifat *tài chính*, pengetahuan, maupun jaringan sosial mereka dapat menciptakan peluang untuk mencapai tujuan gerakan mereka dengan lebih efektif (Christofer, 2019, tugas penting gerakan sosial yang meliputi mobilisasi dukungan, pengorganisasian sumber daya, dan menciptakan simpati di antara elit serta masyarakat umum, sehingga memperkuat motivasi untuk mengerahkan sumber daya yang ada).

Sumber daya dalam konteks gerakan sosial memiliki definisi yang luas dan meliputi berbagai elemen seperti pengetahuan, keahlian, keterampilan organisasi, dan bahkan loyalitas dari para anggotanya (Sodjinou et al., 2020). Seiring dengan itu, Efektifitas mobilisasi sumber daya sangat dipengaruhi oleh pengaturan yang

diambil oleh pemimpin gerakan dalam mengoordinasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada. Seperti dicontohkan dalam penelitian tentang keberlanjutan organisasi dan partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial, kemampuan untuk mobilize sumber daya dengan efektif terbukti penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan gerakan (Tang, 2019).

Oleh karena itu, Teori Mobilisasi Sumber Daya memberikan perspektif yang berharga dalam analisis gerakan sosial, menjelaskan bagaimana akses dan pengelolaan sumber daya yang bermanfaat dapat berkontribusi pada pencapaian perubahan sosial yang lebih besar. Pada akhirnya, dalam mobilisasi sumber daya, memahami peran dan fungsi sumber daya itu sendiri menjadi kunci bagi aktor-aktor dalam mencapai aspirasi kolektif mereka.

Dalam kajian gerakan sosial, pemahaman mengenai jenis-jenis sumber daya yang dimiliki oleh aktor gerakan menjadi sangat penting. Meskipun Zald tidak mendefinisikan secara rinci apa yang dimaksud dengan sumber daya, Edward dan McCarthy menjelaskan klasifikasi sumber daya menjadi lima kategori, sebagaimana diuraikan oleh Snow dan rekan-rekannya (2004: 125-128). Kategori-kategori ini meliputi:

1. *Moral Resources*

Moral resources bisa dipahami sebagai legitimasi, dukungan, solidaritas, serta simpati dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Legitimasi menjadi inti dari kategori ini, karena dukungan dan simpati sering kali diperoleh melalui proses legitimasi yang kompleks. Dalam fase-fase tertentu dari suatu gerakan sosial, tantangan yang dihadapi dalam memperoleh legitimasi baik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat umum maupun dukungan dari tokoh-tokoh penting dapat menjadi hambatan signifikan bagi keberlangsungan gerakan tersebut. Proses ini sering kali membutuhkan waktu, usaha, dan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan legitimasi publik.

2. *Cultural Resources*

Cultural resources mengacu pada produk budaya yang dimiliki oleh aktor gerakan sosial. Kategori ini berhubungan erat dengan *stock of knowledge* yang

dimiliki oleh aktor-aktor tersebut. *Cultural resources* mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya seperti musik, literatur, majalah, surat kabar, film, dan video. Produk-produk budaya ini tidak hanya berfungsi untuk merekrut anggota baru tetapi juga untuk menyosialisasikan nilai-nilai gerakan kepada mereka. Dengan menyediakan konteks dan bentuk ekspresi yang mendukung, *cultural resources* membekali anggota gerakan dengan kapasitas untuk bertindak dan berkontribusi pada agenda gerakan.

3. *Social-Organizational Resources*

Kategori ini meliputi organisasi sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan gerakan sosial. Tiga elemen kunci yang termasuk dalam social-organizational resources adalah infrastruktur, jaringan sosial, dan organisasi itu sendiri. Jaringan sosial, khususnya, direpresentasikan sebagai sumber daya yang penting untuk mendapatkan legitimasi dan akses terhadap sumber daya lainnya, termasuk dukungan finansial. Organisasi yang solid dan terstruktur membantu dalam mengoordinasikan tindakan, memfasilitasi komunikasi antar anggota, dan memperkuat posisi gerakan dalam menghadapi pihak lawan.

4. *Human Resources*

Human resources terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam gerakan, beserta potensi pengalaman dan keahlian mereka. Kategori ini menyoroti pentingnya keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan gerakan sosial. Pengalaman praktis, kemampuan manajerial, serta pengetahuan khusus dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas dan daya tarik gerakan. Ketika aktor gerakan memiliki keahlian yang diperlukan, mereka dapat mengoptimalkan potensi mobilisasi sumber daya lainnya.

5. *Material Resources*

Material resources merupakan kategori yang terdiri dari sumber daya ekonomi, yang biasanya disebut sebagai modal finansial dan fisik. Ini mencakup uang, properti, gedung, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan gerakan. Aspek ini sangat penting, mengingat tanpa modal finansial, meskipun ada dukungan sosial atau sumber daya lainnya, mobilisasi gerakan sosial akan tersendat. Keberadaan dan akses kepada

material resources sering kali menentukan keberhasilan suatu gerakan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Pemahaman tentang berbagai kategori sumber daya dalam mobilisasi sumber daya menjadi sangat penting bagi aktor gerakan sosial. Setiap jenis sumber daya ini memiliki perannya masing-masing dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan suatu gerakan.

Salah satu aspek krusial dalam gerakan sosial, di samping sumber daya (resources), adalah mobilisasi. Mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika sumber daya tidak dimobilisasi, gagasan yang ada akan tetap mengawang-awang tanpa wujud nyata, yang mengakibatkan ketidakmampuan gerakan dalam meraih perubahan. Dalam konteks ini, mobilisasi menjadi sarana yang tidak hanya menggerakkan sumber daya tapi juga mengintegrasikannya ke dalam praktik nyata untuk mencapai tujuan.

Tilly, dalam teorinya, mengidentifikasi mobilisasi sebagai komponen penting yang mengikuti penentuan sumber daya. Sebagaimana dijelaskan oleh Winarno (2012: 23), mobilisasi meliputi proses di mana suatu kelompok mendapatkan kontrol kolektif atas sumber daya yang ada. Tilly menggambarkan berbagai elemen yang mempengaruhi mobilisasi melalui empat variabel kunci: *interest*, *organization*, *mobilization*, dan *opportunity*.

a. *Interest*

Interest merujuk pada hasil yang dinamis dalam interaksi kelompok dengan kelompok lain, termasuk keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, kelompok harus memahami dan mengevaluasi kepentingan mereka secara kolektif untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam perlawanan mereka.

b. *Organization*

Aspek *organization* berfokus pada struktur internal dan eksternal dari kelompok yang bersangkutan. Struktur organisasi mempengaruhi kapasitas dan kemampuan kelompok untuk bertindak secara efektif. Organisasi yang

terstruktur dengan baik menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi anggota dalam berkontribusi pada tujuan bersama.

c. *Mobilization*

Mobilization sendiri adalah proses di mana kelompok memperoleh kontrol kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan. Proses ini penting agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan gerakan. Tanpa mobilisasi yang tepat, sumber daya yang ada mungkin tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

d. *Opportunity*

Opportunity mencakup hubungan kelompok dengan konteks sosial dan politik yang lebih luas. Ini berkaitan dengan bagaimana perubahan dalam lingkungan eksternal dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi kepentingan kelompok. Pemahaman atas kesempatan ini sangat penting bagi kelompok untuk melakukan penyesuaian strategi dan tindakan.

Kerangka dari Teori Mobilisasi Sumber Daya menekankan pentingnya dua aspek yang saling berkaitan ini. Pertama, ada penekanan terhadap identifikasi dan pengelolaan sumber daya baik fisik, non-fisik, maupun finansial yang berada dalam kendali kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Sumber daya ini dapat mengambil bentuk jaringan sosial, dukungan finansial, pengetahuan, serta keterampilan yang relevan dengan agenda yang diperjuangkan.

Kedua, mobilisasi diartikan sebagai proses yang tak terpisahkan dari upaya aktor-aktor dalam menggunakan sumber daya tersebut menuju pencapaian tujuan gerakan. Untuk bisa efektif, kedua elemen ini harus bersinergi; tanpa mobilisasi yang memadai, sumber daya yang ada tidak akan menghasilkan dampak concreto, dan sebaliknya, tanpa ketersediaan sumber daya yang cukup, mobilisasi mungkin tidak dapat dilakukan dengan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan gerakan sosial, pengelolaan sumber daya yang baik dan proses mobilisasi yang efektif adalah kunci utama. Sinergi antara kedua

aspek ini akan mendukung pengembangan gerakan sosial yang kuat dan berkelanjutan, sehingga mendorong perubahan sosial yang diinginkan.

Model mobilisasi sumber daya berupaya untuk menggantikan pendekatan-pendekatan yang lebih tradisional dalam studi gerakan sosial, yang cenderung fokus pada aspek perilaku individu seperti aliran pemikiran, ideologi, wacana, motivasi, dan tindakan. Dalam konteks ini, teori mobilisasi sumber daya lebih menekankan analisis terhadap organisasi-organisasi gerakan sosial sebagai unit-unit yang beroperasi dan menjadi penggerak utama dari setiap gerakan. Elemen kunci dari teori ini adalah fokus pada penggabungan berbagai bentuk, strategi, dan taktik organisasi yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu.

McAdam dan Snow menyatakan bahwa meskipun adanya situasi politik yang mendukung, hal tersebut hanya menciptakan potensi struktural untuk munculnya aksi kolektif. Ketika kapasitas organisasi dan jejaring yang memadai tidak dipenuhi, potensi politik tersebut tidak dapat terealisasi ke dalam bentuk gerakan sosial yang aktif dan berpengaruh. Oleh karena itu, studi tentang "alat atau instrumen" (*means*) atau mekanisme relasional menjadi sangat penting bagi aktivis, dalam rangka menyediakan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk melakukan aksi kolektif yang efektif.

Tiga aspek infrastruktur yang penting dalam konteks teori mobilisasi sumber daya adalah jaringan komunikasi, kepemimpinan tokoh gerakan, dan basis keanggotaan. Ketiga elemen ini berperan krusial dalam membangun sinergi dan kapasitas organisasi gerakan sosial.

1. Jaringan Komunikasi: Jaringan yang kuat memungkinkan informasi dan strategi disebarkan secara efisien di antara anggota gerakan, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam tindakan.
2. Kepemimpinan atau Tokoh Gerakan: Pemimpin yang efektif dapat menginspirasi dan memotivasi anggota, serta memberikan arahan strategis yang penting untuk mobilisasi sumber daya.
3. Basis Keanggotaan: Sebuah basis keanggotaan yang luas dan beragam tidak hanya memperkuat legitimasi gerakan tetapi juga menambah kekuatan mobilisasi.

Dengan demikian, pendekatan mobilisasi sumber daya menekankan bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tidak hanya diperlukan sumber daya tetapi juga mobilisasi yang efektif dari sumber daya tersebut melalui organisasi yang terstruktur. Hal ini menandakan bahwa interaksi antara sumber daya dan mobilisasi sangat penting dalam memahami dinamika gerakan sosial.

Dalam konteks studi mengenai gerakan penolakan revisi RUU Pilkada 2024, teori mobilisasi sumberdaya digunakan untuk menganalisis bagaimana akun Instagram @narasi.tv berperan dalam mendukung gerakan tersebut melalui media sosial. Penelitian ini melihat bagaimana @narasi.tv memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, seperti jaringan media, akses terhadap informasi, kredibilitas publik, dan dukungan dari komunitas digital, untuk memfasilitasi penyebaran informasi dan memperkuat narasi penolakan terhadap revisi RUU Pilkada.

Penelitian ini juga menyoroti bagaimana @narasi.tv merekrut partisipasi publik, baik melalui interaksi langsung dengan audiens di kolom komentar, penyebaran konten visual dan naratif yang kuat, maupun kolaborasi dengan figur publik, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, fokus juga diberikan pada bentuk kepemimpinan media sebagai aktor non-formal dalam gerakan sosial digital serta bagaimana solidaritas digital dibangun melalui strategi komunikasi yang sistematis. Studi ini bertujuan memahami peran media alternatif seperti @narasi.tv sebagai agen mobilisasi dalam memperkuat dan memperluas dukungan terhadap gerakan masyarakat sipil di era media sosial.

2.7 New Media

Media baru, atau *New Media*, merujuk pada berbagai bentuk teknologi komunikasi yang telah mengalami proses digitalisasi dan kini tersedia secara luas untuk penggunaan individu dalam konteks komunikasi (McQuail, 2011: 148). Kehadiran media baru merupakan hasil dari transformasi dan inovasi terhadap media tradisional yang mulai kehilangan relevansinya seiring dengan kemajuan teknologi modern. Media ini mencakup media digital serta jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat sejak akhir abad ke-20.

Creeber dan Martin (2009) mendefinisikan *New Media* atau media daring sebagai bentuk komunikasi yang dimediasi oleh teknologi dan berbasis pada sistem komputer digital. Sementara itu, definisi lain menyebutkan bahwa *New Media* adalah media yang menggunakan jaringan internet, berbasis teknologi daring, bersifat fleksibel, memiliki potensi interaktif, dan dapat berfungsi baik dalam ruang privat maupun publik (Mondry, 2008: 13). Dalam konteks ini, internet merupakan salah satu wujud utama dari media baru.

Teori media baru dikembangkan oleh Pierre Levy, teori ini menjelaskan bahwa konsep ini berfokus pada evolusi dan perkembangan media. Dalam teori ini, terdapat dua pendekatan utama, salah satunya adalah pendekatan interaksi sosial, yang mengkategorikan media berdasarkan tingkat kedekatannya dengan komunikasi tatap muka. Levy melihat World Wide Web (WWW) sebagai ruang informasi yang terbuka, fleksibel, dan terus berubah, yang memberikan peluang bagi manusia untuk membentuk cara baru dalam memperoleh dan mengorganisasi pengetahuan.

Era Media baru digambarkan oleh Little John diantaranya Era Media yang pertama (1) Sentralisasi Produktif (satu menjadi banyak), (2) Komunikasi satu arah, (3) kendali situasi untuk sebagian besar, (4) reproduksi stratifikasi sosial dan perbedaan melalui media, (5) audiens massa yang terpecah, dan (6) pembentukan kesadaran sosial. Era Media Kedua, digambarkan (1) desentralisasi, (2) dua arah, (3) di luar kendali situasi, (4) demokratisasi, (5) mengangkat kesadaran individu, dan (6) orientasi individu. (Littlejohn dkk, 2008: 413).

Everett M. Rogers (dalam Abrar, 2003:17–18) membagi perkembangan media komunikasi menjadi empat tahapan utama, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetak, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Media baru atau *New Media* muncul dan berkembang pada tahap terakhir, yakni era komunikasi interaktif, yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital dan keterlibatan aktif dari pengguna dalam proses komunikasi.

Menurut R. Cahyo Prabowo, media baru merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah, pertukaran pendapat dan informasi, serta akses terhadap berita secara cepat melalui jaringan internet. Informasi yang

disajikan bersifat aktual, cepat tersebar, dan lebih efisien dalam menjangkau masyarakat luas. Media baru ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan media konvensional seperti radio, televisi, media cetak, dan bentuk media massa tradisional lainnya.

2.7.1 Ciri-ciri *New Media*

Martin Lister, dalam bukunya berjudul *New Media: A Critical Introduction* menjelaskan ciri-ciri media baru, (Lister, 2009:11). Berikut adalah ciri-cirinya:

1. Bentuk pengalaman baru dalam teks, hiburan, kesenangan, dan pola dari konsumsi media (permainan komputer, simulasi, efek khusus film).
2. Cara baru dalam mempresentasikan dunia, penggunaan media yang menawarkan kemungkinan representasional baru.
3. Bentuk hubungan baru antara pengguna, konsumen, dengan teknologi media.
4. Bentuk pengalaman baru dari identitas diri maupun komunitas dalam berinteraksi.
5. Bentuk konsepsi baru dari hubungan manusia secara biologis dengan teknologi media.

2.7.2 Karakteristik *New Media*

Denis McQuail, seorang tokoh penting dalam studi komunikasi, dalam bukunya *Teori Komunikasi Massa* (2011) menjelaskan sejumlah karakteristik utama dari media baru, antara lain:

1. Terdapat keterhubungan atau interkoneksi.
2. Kemampuan untuk mengakses khalayak orang, baik sebagai penerima atau pengirim pesan.
3. Tingkat interaktivitas yang tinggi.
4. Sejumlah fungsi yang mencerminkan karakter terbuka.
5. Keberadaannya yang bersifat menyeluruh atau ada di mana-mana.

2.8 Media Sosial

Mengacu pada pandangan Cahyono (2016), media sosial yakni suatu media *online* yang memberi peluang para pemakainya untuk secara mudah berpartisipasi, berbagi, serta menciptakan konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual. Blog, jejaring sosial, serta wiki adalah wujud media sosial yang sangat umum dipergunakan oleh masyarakat di penjuru dunia.

Salah satu definisi lain mengenai media sosial dikemukakan oleh Chris Brogan (2010:11) dalam bukunya *Media Sosial 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online*. Ia menggambarkan media sosial sebagai seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang membuka peluang bagi berbagai bentuk interaksi yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.

Pendapat lain menyebutkan bahwa media sosial merupakan media daring yang memfasilitasi interaksi sosial, dengan memanfaatkan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi satu arah menjadi dialog yang bersifat interaktif.

Media sosial punya pengaruh besar dalam kehidupan kita pada masa kini. Media kini mampu menghilangkan batasan-batasan dalam bersosialisasi, baik dalam hal ruang atau waktu. Melalui media sosial, manusia bisa menjalin komunikasi satu sama lain di mana saja mereka berada serta kapan pun, dengan tidak memperhitungkan jarak atau waktu, baik siang maupun malam.

Media sosial memiliki peran utama sebagai media komunikasi, interaksi, serta berbagi informasi secara cepat serta luas. Dengan media sosial, individu mampu terkoneksi dengan kawan, kerabat, atau komunitas dari berbagai belahan dunia, menguatkan jalinan hubungan, dan memperluas jaringan sosial. Selain itu, media sosial mempunyai fungsi untuk menjadi *platform* dalam berbagi ide, karya, serta informasi yang bermanfaat, serta menjadi sarana promosi bisnis yang efektif, memungkinkan merek dan individu guna menjangkau audiens yang semakin luas secara mudah.

Karakteristik utama media sosial meliputi interaktivitas, aksesibilitas, dan kemampuan untuk menyebarkan konten secara instan. Media sosial biasanya dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan pengguna memberikan komentar, menyukai, atau membagikan konten secara langsung, menciptakan pengalaman

yang interaktif dan kolaboratif. Selain itu, media sosial bisa diakses dengan beragam perangkat contohnya gawai serta komputer, sehingga mempermudah pengguna dalam terhubung kapan pun serta di mana pun. Konten yang diunggah, baik berupa teks, gambar, video, maupun audio, juga tersebar dengan cepat, menjadikan media sosial sebagai platform yang dinamis dan responsif terhadap tren serta kebutuhan pengguna.

2.8.1 Fungsi Media Sosial

Saat ini, media sosial telah menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh dalam membentuk pola perilaku dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Peranannya yang besar terlihat dari berbagai fungsi penting yang dimilikinya, antara lain:

- a) Media sosial merupakan platform yang dirancang untuk memperluas jangkauan interaksi sosial antarindividu melalui pemanfaatan internet dan teknologi berbasis web.
- b) Media sosial telah mengubah cara komunikasi tradisional yang bersifat satu arah dari lembaga penyiaran ke banyak pemirsa menjadi bentuk komunikasi dua arah atau bahkan banyak arah, di mana semua pengguna bisa saling berinteraksi dan merespons secara langsung.
- c) Platform ini juga mendorong proses demokratisasi informasi, karena setiap orang kini tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga dapat menjadi pencipta dan penyebar informasi itu sendiri.
- d) Selain itu, media sosial membuka peluang ekonomi, di mana pengguna dapat memperoleh penghasilan melalui iklan, kerja sama sponsorship, penjualan produk pribadi, maupun pembuatan konten kreatif yang menarik bagi audiens.

2.8.2 Bentuk-bentuk Media Sosial

Menurut Nasrullah, media sosial dapat dibagi ke dalam enam kategori utama, yaitu:

- 1) Media Jejaring Sosial (Social Networking)
Media jejaring sosial adalah jenis media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Platform ini memungkinkan pengguna

menjalin hubungan sosial secara virtual, yang bisa berdampak pada interaksi mereka di dunia nyata. Ciri khas dari media ini adalah adanya jaringan pertemanan yang dibentuk, baik dengan orang yang sudah dikenal sebelumnya maupun yang baru dikenal secara daring. Contoh dari media jejaring sosial adalah Instagram.

2) Blog atau Jurnal Online

Blog adalah platform yang memungkinkan seseorang membagikan aktivitas pribadi, opini, atau informasi tertentu, serta memberi dan menerima komentar dari pengguna lain. Pada awal kemunculannya, blog digunakan sebagai laman pribadi yang berisi tautan ke situs-situs menarik yang diperbarui secara rutin. Seiring waktu, blog berkembang menjadi catatan harian digital yang dapat diakses publik dan dilengkapi dengan kolom komentar. Blog dibagi menjadi dua jenis utama: yang menggunakan domain pribadi seperti .com atau .net, dan yang menggunakan layanan gratis seperti WordPress atau Blogspot.

3) Microblog atau Jurnal Online Sederhana

Microblog mirip dengan blog, namun memiliki format yang lebih ringkas. Pengguna dapat membagikan kegiatan, opini, atau informasi dalam bentuk tulisan singkat yang langsung dipublikasikan. Twitter adalah contoh paling populer dari jenis media sosial ini.

4) Media Berbagi (*Media Sharing*)

Jenis media sosial ini berfokus pada aktivitas berbagi berbagai jenis konten seperti gambar, video, audio, maupun dokumen. Pengguna dapat mengunggah dan mendistribusikan konten mereka kepada publik. Contoh dari media berbagi antara lain YouTube, Flickr, PhotoBucket, dan Snapfish.

5) Penanda Sosial (*Social Bookmarking*)

Media ini berfungsi sebagai alat untuk menyimpan, mengatur, dan mencari berbagai informasi atau tautan penting secara online. Situs-situs yang terkenal dalam kategori ini antara lain Delicious, StumbleUpon, Digg, Reddit, dan di Indonesia dikenal dengan LintasMe.

6) Wiki atau Media Konten Kolaboratif

Wiki merupakan platform media sosial di mana isi atau kontennya dibangun melalui kontribusi bersama dari para penggunanya. Situs jenis ini menyajikan informasi berupa definisi, sejarah, referensi, dan sebagainya yang dapat diedit dan diperbarui oleh siapa saja. Prinsip kerja wiki adalah kolaboratif, seperti yang terlihat pada ensiklopedia daring Wikipedia.

Berikut adalah beberapa situs media sosial yang populer di Indonesia:

1) Facebook

Facebook merupakan salah satu platform jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk bergabung dalam berbagai komunitas, seperti berdasarkan tempat tinggal, tempat kerja, sekolah, atau wilayah tertentu. Melalui platform ini, pengguna bisa menjalin relasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan fitur-fitur yang terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, Facebook menjadi salah satu media sosial paling populer dan banyak digunakan, termasuk di Indonesia.

2) Whatsapp

WhatsApp adalah aplikasi komunikasi yang beroperasi melalui koneksi internet dan merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi. Aplikasi ini sangat efisien digunakan karena memudahkan orang untuk berkomunikasi tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Pengguna hanya perlu menggunakan kuota internet, tanpa pulsa reguler, untuk bertukar pesan, melakukan panggilan suara maupun video.

3) Instagram

Instagram adalah platform media sosial yang berfokus pada konten visual seperti foto dan video pendek. Aplikasi ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis daring sebagai media promosi. Selain itu, seniman, artis, hingga pembuat konten (content creator) juga menjadikan Instagram sebagai tempat untuk menampilkan karya dan menjangkau audiens yang lebih luas.

4) YouTube

YouTube merupakan situs berbagi video yang menyediakan konten audiovisual bagi penggunanya. Platform ini sangat populer di kalangan anak muda karena menyajikan tayangan yang bisa ditonton langsung. Walaupun sering dianggap sebagai media hiburan, pada kenyataannya YouTube juga berfungsi sebagai media sosial karena memungkinkan pengguna untuk mengunggah video, memberikan komentar, serta berinteraksi dengan kreator lain.

5) Twitter

Twitter adalah platform media sosial berbasis microblogging yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan singkat atau tweet dengan batasan jumlah karakter tertentu. Kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya menjadikan Twitter sangat diminati, terutama pada masa puncak popularitasnya. Twitter dikenal sebagai salah satu platform microblogging paling sukses di dunia.

6) TikTok

TikTok adalah aplikasi media sosial yang berfokus pada pembuatan dan berbagi video pendek. Aplikasi ini sangat digemari oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda, karena memungkinkan mereka mengekspresikan diri secara kreatif melalui musik, tarian, dan berbagai tantangan viral. TikTok juga menjadi ruang baru bagi content creator untuk membangun audiens dan mengembangkan personal branding.

Pemanfaatan media sosial mempunyai akibat positif serta negatif yang mempengaruhi penggunanya baik secara langsung atau tidak langsung. Melalui sisi positif, media sosial memungkinkan individu untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan memperluas jaringan dengan mudah. Banyak orang yang menggunakannya untuk membangun bisnis, mempelajari hal-hal baru, atau memperluas wawasan, sehingga media sosial memiliki fungsi untuk menjadi wadah dalam berkarya serta berkembang. Selain itu, media sosial memberi peluang kita untuk selalu terkoneksi dengan kawan serta kerabat yang jaraknya tidak dekat, mempererat hubungan, dan saling memberikan dukungan.

Namun, di sisi negatif, media sosial dapat menimbulkan tekanan sosial, kecanduan, dan membentuk persepsi yang tidak realistis tentang kehidupan. Terlalu sering melihat gambaran kehidupan orang lain yang tampak sempurna dapat memicu perasaan cemas, rendah diri, dan iri. Di samping itu, pemakaian media sosial yang melebihi batas wajar turut menyebabkan gangguan kesehatan mental dan produktivitas akibat waktu yang terbuang. Kebiasaan membandingkan diri dan kesusahan dalam mengetahui informasi yang betul serta yang keliru juga berpotensi memicu kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Dengan demikian, sangat perlu diperhatikan dalam mempergunakan media sosial secara bijaksana, menyeimbangkan waktu *online* dan *offline*, serta tetap bersikap kritis terhadap informasi yang diperoleh.

Media sosial sebagai bagian dari *New Media* memainkan peranan penting dalam lanskap politik modern, tidak hanya sebagai alat kampanye bagi individu atau partai politik, tetapi juga sebagai ruang komunikasi alternatif yang memungkinkan munculnya suara-suara kritis terhadap pemerintah. Akun media sosial seperti @narasi.tv menjadi contoh nyata bagaimana *New Media* dapat digunakan untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan memperjuangkan transparansi serta keadilan dalam sistem demokrasi.

@narasi.tv beroperasi bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai wadah edukasi politik yang aktif menyoroti isu-isu publik dan menyampaikan suara-suara yang selama ini mungkin tidak terwakili di media arus utama. Perannya penting dalam membangun kesadaran kolektif, terutama di kalangan generasi muda, terhadap dinamika politik dan ancaman terhadap demokrasi, seperti dalam kasus penolakan revisi RUU Pilkada.

Suharyanto (2016) mencatat bahwa dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah wajah komunikasi politik. Media sosial dianggap sebagai sumber pengetahuan dan alat interaktif yang melibatkan elemen-elemen sosial, ekonomi, serta politik. Dengan cara ini, *New Media* memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas, memungkinkan pemilih untuk terlibat secara langsung dalam diskursus politik dan demokrasi.

Selain tokoh politik seperti Anies Baswedan yang memanfaatkan media sosial untuk membangun kedekatan dengan publik, lembaga independen seperti

@narasi.tv membuktikan bahwa *New Media* juga efektif sebagai instrumen pengawasan publik (*watchdog*) terhadap kekuasaan. Dalam konteks pemilu dan pengambilan kebijakan, media sosial memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik, mempengaruhi persepsi pemilih, dan mendorong akuntabilitas para pemegang kekuasaan.

Oleh karena itu, keberadaan akun-akun seperti @narasi.tv memperlihatkan bahwa *New Media* berperan bukan hanya sebagai alat kampanye, melainkan juga sebagai medium demokratisasi informasi yang dapat memperkuat keberagaman suara, melawan ketidakadilan, dan menjaga semangat kritis dalam masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian dikualifikasikan sebagai berikut:

a. Sifat

Penelitian ini sifatnya deskriptif yakni guna mendeskripsikan *framing* aksi penolakan rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada 2024 pada akun media sosial Instagram @narasi.tv.

b. Penerapan

Penelitian ini adalah penelitian dasar bagi pengembangan ilmu komunikasi terutama studi analisis *framing* serta gerakan sosial.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena sosial secara mendalam, menyeluruh, dan luas. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada filsafat tertentu dan digunakan untuk mengkaji suatu kondisi ilmiah (eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan dan analisis data dalam pendekatan ini bersifat kualitatif dan lebih menitikberatkan pada makna dari data yang dikumpulkan.

Pendekatan kualitatif berupaya memahami pengalaman subjek penelitian dalam berbagai aspek, seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi, dan tindakan. Pemahaman tersebut disampaikan dalam bentuk deskriptif menggunakan bahasa yang sesuai.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi serta mendeskripsikan fenomena sosial secara mendalam dengan data berbentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Metode ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, dan tindakan subjek penelitian melalui analisis deskriptif.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *framing* digunakan oleh akun Instagram @narasi.tv dalam menyajikan isu gerakan sosial yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Fokus penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Jenis *framing* yang digunakan dalam pesan visual dan teks penelitian akan mengidentifikasi berbagai jenis *framing* yang diterapkan dalam unggahan akun @narasi.tv, termasuk *framing* masalah, penyebab, solusi, dan moral, untuk melihat bagaimana akun ini membingkai isu revisi Undang-Undang Pilkada sebagai masalah yang perlu mendapat perhatian publik.
2. Pendekatan visual dan naratif dalam membangun opini publik penelitian akan mengeksplorasi peran konten visual (gambar, infografis, dan video) serta narasi teks yang menyertai unggahan dalam mempengaruhi persepsi audiens. Fokus ini mencakup analisis bagaimana elemen visual dan teks digunakan secara strategis untuk memperkuat pesan dan membangkitkan emosi.
3. Respons dan interaksi audiens terhadap unggahan yang dibingkai fokus lain dari penelitian ini adalah melihat respons audiens dalam bentuk komentar, likes, dan repost untuk mengetahui sejauh mana *framing* yang dilakukan @narasi.tv berhasil mendorong keterlibatan audiens dan mendukung gerakan sosial tersebut.
4. Tujuan dan implikasi *framing* dalam mendukung gerakan sosial penelitian akan menganalisis tujuan utama *framing* yang diterapkan oleh

@narasi.tv dan bagaimana *framing* ini berupaya membangun kesadaran serta solidaritas publik. Fokus ini mencakup pemahaman terhadap implikasi *framing* bagi audiens dan kaitannya dalam meningkatkan dukungan terhadap gerakan sosial menolak revisi Undang-Undang Pilkada.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di penelitian ini mempergunakan Instagram untuk menjadi sumber data yang melibatkan beberapa aspek, yaitu:.

1. Dokumentasi Digital

Merupakan sumber visual yang kaya akan informasi, dapat dianalisis melalui elemen-elemen seperti komposisi, warna, objek, dan simbol untuk menangkap makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengguna. Proses pengumpulan data berupa gambar dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan unggahan dalam akun Instagram @narasi.tv kemudian menganalisis setiap unggahan yang diunggah. Peneliti telah mengumpulkan 7 unggahan berupa gambar di akun Instagram @narasi.tv yang membahas mengenai revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada dan gerakan demo menolak pengesahan RUU Pilkada.

Dokumentasi digital berfungsi sebagai sumber data yang memperlihatkan konten baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk narasi visual yang bergerak, termasuk ekspresi dan intonasi yang bisa memberi konteks tambahan terhadap pesan yang disampaikan. Proses pengumpulan data berupa gambar dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan unggahan dalam akun Instagram @narasi.tv kemudian menganalisis setiap unggahan yang diunggah. Peneliti telah mengumpulkan 5 unggahan berupa video reels di akun Instagram @narasi.tv yang membahas mengenai revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada dan gerakan demo menolak pengesahan RUU Pilkada.

Dokumentasi berupa tangkapan layar (*screenshot*) atau arsip unggahan memungkinkan peneliti menyimpan bukti konten video yang mungkin akan hilang atau dihapus di kemudian hari, sehingga memudahkan untuk referensi

atau analisis di tahap selanjutnya. Dokumentasi berupa arsip *story* mInstagram yang dibuat oleh akun Instagram @narasi.tv.

2. Studi Pustaka

Menurut Nazir (1988) dalam (Alfaridzi, 2022), studi pustaka yakni teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui mengkaji buku, literatur, catatan, juga beragam laporan yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih untuk memudahkan penulis memperoleh berbagai informasi literatur yang relevan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun penelitian. Salah satu referensi yang dipergunakan di penelitian ini yakni buku yang memiliki judul “*Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*” karya Mulyana dan Eriyanto.

Setiap aspek data ini dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang menyeluruh mengenai perilaku, preferensi, dan dinamika interaksi pengguna di Instagram.

3.5 Teknik Analisis Data

Di penelitian ini, peneliti mempergunakan analisis data yang merujuk terhadap pendekatan kualitatif yang memiliki fungsi guna melihat *framing* gerakan sosial tidak menyetujui revisi rancangan Undang-Undang Pilkada pada unggahan di akun Instagram @narasi.tv. Oleh karena itu, peneliti mempergunakan analisis *framing* untuk menjadi alat analisis guna menguraikan bagaimana *framing* gerakan sosial menolak revisi Undang-Undang Pilkada melalui model analisis *framing* William A. Gampson serta Modigliani, yakni: *Core frame* menjadi ide sentral, *Condensing Symbols (Framing* serta *Reasoning Device*).

Tabel 4. Model Analisis *Framing* William A gampson dan Modigliani

<i>Core Frame</i>	
<i>Framing Devices</i>	<i>Reasoning Devices</i>
<i>Metaphors</i>	<i>Roots</i>

<i>Exemplars</i>	<i>Appeal to Principle</i>
<i>Catchphrases</i>	<i>Consequences</i>
<i>Depictions</i>	
<i>Visual Images</i>	

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan penelitian adalah elemen utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dan kesimpulan penelitian ini memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi. Berikut adalah strategi yang digunakan untuk memastikan keabsahan penelitian ini:

1. Triangulasi Data

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini mempergunakan metode triangulasi, yaitu melalui menggabungkan berbagai sumber data pada proses analisis. Triangulasi data dilakukan melalui:

- a) Triangulasi Sumber: Memanfaatkan berbagai unggahan yang berkaitan dengan gerakan sosial menolak revisi Undang-Undang Pilkada di akun Instagram @narasi.tv dari periode waktu tertentu, misalnya beberapa hari sebelum dan sesudah revisi UU Pilkada menjadi isu yang hangat di publik.
- b) Triangulasi Metode: Melakukan kombinasi antara analisis konten (untuk mengevaluasi teks dan gambar yang digunakan) dan analisis komentar audiens (untuk memahami respons publik), yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang *framing* yang digunakan dan reaksi audiens.

2. Penggunaan Referensi Teoritis

Penelitian ini menggunakan landasan teori *framing* dari pakar-pakar seperti Robert Entman dan Erving Goffman yang telah banyak diaplikasikan dalam studi *framing* pada media sosial. Teori-teori ini akan membantu dalam

mengarahkan analisis serta menjaga keakuratan dalam memahami jenis *framing* yang diterapkan oleh @narasi.tv.

Dengan metode-metode keabsahan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang kredibel, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga analisis *framing* yang dilakukan benar-benar mencerminkan bagaimana @narasi.tv mengelola isu gerakan sosial untuk menolak pengesahan revisi rancangan UU Pilkada di Instagram.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Produksi pesan dalam akun Instagram @narasi.tv mencerminkan strategi komunikasi politik yang efektif melalui pendekatan multimedia dan simbolik untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi RUU Pilkada 2024. Dengan memadukan elemen visual, audio, dan teks, serta memanfaatkan narasi emosional, simbol kritis, dan kolaborasi digital, @narasi.tv berhasil membingkai isu demokrasi secara persuasif. Kontennya tidak hanya menyadarkan publik akan ancaman terhadap demokrasi, tetapi juga mengajak mereka bertindak dan mengkritik institusi negara yang dianggap mengabaikan prinsip demokratis. Hal ini menunjukkan peran media sosial sebagai ruang strategis dalam mengartikulasikan wacana kritis dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Framing penolakan terhadap revisi RUU Pilkada 2024 yang disampaikan oleh akun Instagram @narasi.tv menunjukkan penggunaan perangkat *framing* yang kompleks dan strategis untuk membangun wacana politik yang kritis. Pada bagian *Framing Devices*, perangkat-perangkat seperti *metaphors*, *catchphrases*, *exemplar*, *depiction*, serta *visual image* digunakan secara sinergis untuk memperkuat pesan yang disampaikan.

Metafora yang digunakan menekankan ketimpangan proses legislasi, dengan gambaran yang menyentil dan tajam seperti perbandingan cepatnya pengesahan UU Pilkada dengan stagnasi RUU pro-rakyat. *Catchphrases* bersifat ironis dan provokatif, memancing respons emosional publik, dengan ungkapan seperti “UU untuk keluarga, bukan rakyat”. *Exemplar* yang diangkat adalah figur Kaesang Pangarep, sebagai contoh nyata dari politik dinasti dan *privilege* kekuasaan. *Depiction* dalam bentuk narasi dan visual satir seperti “juara 1 nyenengin keluarga” serta penggunaan *visual image* dari aksi protes publik memperkuat sentimen resistensi terhadap DPR dan elite politik.

Pada sisi *reasoning devices*, akun tersebut menggunakan perangkat *Roots*, *Appeal to Principle*, dan *Consequences* secara efektif. *Roots* mengidentifikasi akar permasalahan dalam manipulasi hukum, dengan menyoroti bagaimana keluarga Presiden Jokowi diuntungkan oleh revisi aturan. *Appeal to Principle* mengangkat nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, keadilan, dan integritas hukum sebagai dasar penolakan. Sementara *Consequences* menekankan potensi kerusakan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta munculnya pembangkangan sipil apabila prinsip-prinsip demokrasi terus diabaikan.

Seluruh kombinasi perangkat *framing* dan *reasoning* ini membentuk narasi resistensi yang kuat dan efektif. Namun yang lebih penting, semua itu dibangun dalam kerangka lima *issue framing* utama yang menopang pesan keseluruhan:

1. Ketimpangan Legislasi dan Akses Kekuasaan

Diperlihatkan melalui *metaphors* dan *depiction* yang membandingkan kecepatan pengesahan UU yang berpihak pada elite dengan lambannya pembahasan UU yang berpihak pada rakyat, seperti RUU PRT dan RUU Masyarakat Adat. Hal ini memperlihatkan prioritas politik yang tidak adil.

2. Politik Dinasti

Ditekankan melalui figur Kaesang sebagai exemplar serta *framing Roots* yang menunjukkan bagaimana regulasi diduga disesuaikan untuk melanggengkan kekuasaan keluarga presiden. Isu ini menjadi pusat kritik terhadap ketidakadilan dalam akses kekuasaan.

3. Krisis Demokrasi

Ditampilkan melalui *catchphrases* seperti “Demokrasi dikebiri” dan *metafora* legislasi yang timpang. *Framing* ini menegaskan bahwa revisi UU Pilkada bukan hanya soal prosedur, tetapi ancaman terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

4. Penyalahgunaan Kekuasaan

Terbingkai lewat *Roots* dan *depiction* yang menggambarkan manipulasi hukum dan keberpihakan institusi terhadap kekuasaan keluarga Presiden. Ini menjadi kritik mendalam terhadap kerusakan sistem *checks and balances*.

5. Partisipasi Publik dan Solidaritas Sipil

Terwujud melalui *visual image* dari aksi-aksi protes serta ajakan untuk “turun ke jalan” dan bersuara di media sosial. Pesan ini menunjukkan bahwa gerakan bukan hanya reaksi elite, melainkan respons kolektif dari rakyat yang menuntut demokrasi yang bersih dan adil.

Secara keseluruhan, *framing* yang dibangun oleh @narasi.tv tidak berhenti pada kritik, tetapi diarahkan untuk membentuk pemahaman, menumbuhkan kesadaran politik, dan memobilisasi masyarakat agar terlibat dalam upaya mempertahankan demokrasi. Narasi yang disampaikan berhasil menghubungkan isu mikro (*privilege individu*) dengan isu struktural (krisis sistemik), menjadikan media sosial sebagai ruang perlawanan baru yang efektif dan inklusif di tengah tantangan politik yang kompleks.

5.2 Saran

1. Penguatan Edukasi Publik: Disarankan untuk meningkatkan upaya edukasi publik secara lebih intens dan massif mengenai proses legislasi dan dampak dari revisi RUU Pilkada. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, diskusi publik, atau seperti yang telah dilakukan oleh Narasi melalui kampanye media sosial yang menjelaskan secara mendalam tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.
2. Pengembangan Konten Kreatif: Untuk memperluas jangkauan pesan, disarankan agar konten yang disampaikan menggunakan berbagai format kreatif, seperti video animasi yang lebih ekspresif, infografis, atau podcast. Hal ini dapat membantu menarik perhatian lebih banyak audiens dan memudahkan pemahaman terhadap isu yang kompleks.
3. Peningkatan Dialog dengan Pembuat Kebijakan: Mendorong dialog konstruktif antara masyarakat dan pembuat kebijakan untuk menyampaikan

aspirasi dan kekhawatiran terkait revisi RUU Pilkada. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan ruang bagi partisipasi publik yang lebih inklusif dalam proses legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Firdaus. (2024). *Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 31, hal. 636–665.
- Ayuningtyas, D. (2012). *Interaksi dan kepentingan elit pada perubahan status rumah sakit daerah menjadi perseroan terbatas*. Jurnal Aspirasi, Vol. 2, No. 1, hlm. 47–62.
- Beauvoir, Simone de. (2011). *The Second Sex*. London: Vintage Books.
- Benmetan, T., & Setyowibowo, B. (2021). Media Dan Penciptaan Kepanikan Moral: Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Pandemi Covid-19 Di Tirto. Id. *Scriptura*, 11(2), 105–155.
- Borgatta, E. F., & Borgatta, M. L. (1992). *Encyclopedia of Sociology* (Issue v. 2). Macmillan. <https://books.google.co.id/books?id=w4TZAAAAMAAJ>
- Brogan, C. (2010). *Social media 101: Tactics and tips to develop your business online*. John Wiley & Sons.
- Buechler, S. M. (1995). New Social Movement Theories. *The Sociological Quarterly*, 36(3), 441–464. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1995.tb00447.x>
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Creeber, G., & Martin, R. (2008). *Digital culture: Understanding New Media: Understanding New Media*. McGraw-Hill Education (UK).
- Darmawan, T. (2006). *Gerakan Sosial, Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.

- Dyah, Khoerun Nisa P.M. (2021). *Manajemen Produksi Program Shihab & Shihab di Narasi.Tv*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Eriyanto, & Mulyana, D. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: Lkis.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media cetakan ke enam*. Lkis Printing Cemerlang.
- Eudya, A., Prihatin, I., & Saputro, M. (2021). Pengaruh Motivasi, Minat, Dan Manajemen Waktu Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(1), 50–57.
- Fajar, A. (2019). *GERAKAN PETANI: STUDI STRATEGI MOBILISASI GERAKAN MENUNTUT UNDERPASS TOL PASURUAN-PROBOLINGGO OLEH PETANI DESA KLAMPOK KABUPATEN PROBOLINGGO* [Skripsi]. Universitas Airlangga.
- Giddens, A. (1989). *Sociology*. Polity Press.
- Harahap, Muhammad Dahlan. (2022). *Kajian Hukum Pembentukan UU Cipta Kerja Dalam Perspektif UU No.25 Tahun 2019*. *Jurnal Smart Hukum*, Vol. 1, No. 1, hal. 22–34.
- Hidayat, T. (2017). *GERAKAN KOALISI MASYARAKAT SIPIL SUMBAR DALAM AKSI PENYELAMATAN KPK DI KOTA PADANG PADA TAHUN 2015 (Studi: Framing Process dan Mobilisasi Sumberdaya yang dilakukan LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam Aksi Save KPK Terkait Konflik KPK dengan Polri Jilid 3)* [Skripsi]. Universitas Andalas.
- Hooks, Bell. (2014). *The Will to Change: Men, Masculinity, and Love*. New York: Atria Books.
- Hooks, Bell. (2015). *Feminism Is for Everybody: Passionate Politics*. Cambridge: South End Press.

- Indrawan, J., Efriza, & Ilmar, A. (2020). Kehadiran media baru (*New Media*) dalam proses komunikasi politik. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–17.
- Ismail A. 2012. *Akademi Berbagi: Gerakan sosial di dunia digital*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia, Depok.
- Jackson, Stevi, & Jones, Jackie. (2018). *Contemporary Feminist Theories*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Jary, D., & Jary, J. (1995). The transformations of Anthony Giddens—the continuing story of structuration theory. *Theory, Culture & Society*, 12(2), 141–160.
- Jenkins, J. C., & Form, W. (2005). Social movements and social change. *The Handbook of Political Sociology*, 331–349.
- Jurdi, S. (2010). *Historiografi Muhammadiyah Bima: akar sejarah, aktor gerakan, dan praxis sosial*. Center of Nation Building Studies (CNBS).
- Light, D., Keller, S., & Calhoun, C. (1989). *Sociology*. . Random House.
- Macionis, J. J. (1987). *Sociology* (12. bs.). USA, Canada: Pearson Prentice Hall.
- Mappa, Aldi Ashar. 2020. *Analisis Framing Gerakan Sosial menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam Akun Instagram @gejayamanggil*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa*. Salemba Humanika.
- Mondry, M. (2008). *Pemahaman teori dan praktik jurnalistik*. Penerbit Ghalia Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=dS6ztQEACAAJ>
- Mozin, S. Y. dkk. (2025). *Politik dinasti Jokowi dan grand corruption*. Journal of Publicness Studies, Vol. 2 No. 2, hlm. 165–172.
- Mubarok, F. S. (2022). Pemanfaatan *New Media* untuk efektivitas komunikasi di era pandemi. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 10(1), 28–42.

- Naqqiyah, M. (2024). Framing Media William Gamson dan Modigliani: Pemberdayaan Perempuan Dalam Film Charlie's Angel. *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)*, 2(2), 114–126.
- Rahim, A., Siswoyo, M., & Hermawan, A. J. (2022). Citra perempuan dalam media massa (analisis framing William A. Gamson dan Andre Modigliani pada artikel Worklife di website Wolipop). *Jurnal Signal*, 10(1), 1–23.
- Rahma, Alvina Alya, dkk. (2022). *Pengaruh Dinasti Politik terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, hal. 2260–2269.
- Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*.
- Novianti, Fenty. 2021. *Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Bunuh Diri di Lampung*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung, Lampung.
- Putri, Dibyareswari Utami. 2012. *Peran Media Baru Dalam Membentuk Gerakan Sosial (Studi Kasus pada Individu Yang Terlibat dalam Indonesia Unite Di Twitter*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Sarjana Ekstensi. Universitas Indonesia, Depok.
- Saleh, Zamharirah (2021) *Pengembangan Potensi Diri Anak Melalui Program kegiatan Islami Majelis Anak Shaleh Kota Parepare*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Singh, R. (2010). Gerakan sosial baru. (*No Title*).
- Situmorang, A. W. (2007). Gerakan sosial: Studi kasus beberapa perlawanan. (*No Title*).
- Situmorang, J. R. (2012). Pemanfaatan internet sebagai *New Media* dalam bidang politik, bisnis, pendidikan dan sosial budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 73–87.
- Slothuus, R. (2008). More than weighting cognitive importance: A dual-process model of issue framing effects. *Political Psychology*, 29(1), 1–28.

- Snow, D. A., Soule, S. A., & Kriesi, H. (2008). *The Blackwell Companion to Social Movements*. Wiley.
<https://books.google.co.id/books?id=VYrPtQGrKkIC>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarto, K. (2005). *Pengantar sosiologi*. Universitas Indonesia Publishing.
- Suwarno, J. (2016). *Strategi Gemuruh sebagai Gerakan Lingkungan dalam Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Muncar* [Skripsi]. Universitas Jember.
- Sztompka, P. (2004). *Sosiologi. Perubahan. Sosial. (terjemahan)*. Prenada.
- Umar, M. R. dkk. (2024). *Analysis of the political oligarchy DPR of Indonesia during the Jokowi administration (2019–2024)*. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 4, No. 6, hlm. 712–724.
- W. Littlejohn, Stephen & Karen A. Foss. 2014. *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wolf, Naomi. (2015). *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*. London: Vintage Books.
- Winarno, D., Nugroho, H., & Setiono, L. S. (2012). *Gerakan falun gong di Indonesia = Falun gong movement in Indonesia*.
- Zahra Syahputri, A., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol(2), No(1), 160–166.

Internet

- Cnnindonesia.com. (2023). *Pakar UNJ Ungkap Kaitan Dugaan Nepotisme dan Dinasti Politik Jokowi*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231025193316-617-1015961/pakar-unj-ungkap-kaitan-dugaan-nepotisme-dan-dinasti-politik-jokowi>. Diakses Januari 2025.

Kompas.com. (2024). *Jokowi Disebut Intervensi Revisi UU Pilkada demi Kaesang, Ini Respons Istana*
<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/23/13312571/jokowi-disebut-intervensi-revisi-uu-pilkada-demi-kaesang-ini-respons-istana>. Diakses Januari 2025.

Kompas.com. (2024). *Serba-serbi Demo Penolakan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI*
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/23/203000365/serba-serbi-demo-penolakan-revisi-uu-pilkada-di-gedung-dpr-ri?page=all>. Diakses Oktober 2021.

Katadata.co.id. (2024). *Peringatan Darurat Indonesia, Apa Artinya? ini Penjelasannya*
<https://katadata.co.id/berita/nasional/66c70958f0a7c/peringatan-darurat-indonesia-apa-artinya-ini-penjelasannya>. Diakses Desember 2024.

Kompas.com. (2024). *Kenapa Muncul "Peringatan Darurat Indonesia"?*
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/22/101529565/kenapa-muncul-peringatan-darurat-indonesia>. Diakses Desember 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *MK Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bertentangan dengan UUD 1945*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17488&menu=2>. Diakses Juni 2025.

Nasional.kompas.com. (2024). *Rakyat Bergerak, DPR Batalkan Revisi UU Pilkada*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/23/05561731/rakyat-bergerak-dpr-batalkan-revisi-uu-pilkada>. Diakses Desember 2024.

Tempo.co. (2024). *Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia*. <https://www.tempo.co/politik/amnesty-international-beberkan-6-indikator-krisis-demokrasi-di-indonesia-38716>. Diakses Januari 2025.

.